



**SIKAP CHINA MENOLAK RESOLUSI PBB UNEP/EA. 3/RES. 7
TENTANG PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI WILAYAH LAUT**

*(CHINA'S REJECTION OF UN RESOLUTION UNEP/EA.3/RES.7
CONCERNING POLLUTION OF PLASTIC WASTE IN THE SEA AREA)*

SKRIPSI

Oleh:

NOVIANA PUTRI

NIM 140910101019

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**SIKAP CHINA MENOLAK RESOLUSI PBB UNEP/EA. 3/RES. 7
TENTANG PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI WILAYAH LAUT**

*(CHINA'S REJECTION OF UN RESOLUTION UNEP/EA.3/RES.7
CONCERNING POLLUTION OF PLASTIC WASTE IN THE SEA AREA)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

NOVIANA PUTRI

NIM 140910101019

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibuku Lilik Yunaeti, Ayahku Agus Nur Salim dan Adikku Farras Febriansyah
2. Almamater Universitas Jember
3. Keluarga besar Theodore yang selalu menemani dan menguatkan.
4. Keluarga besar Kediri dan Wuluhan.
5. Sahabat terbaikku Gengring.
6. Rekan-rekan Sanggar Tari Cemara Biru dan Savanna Dancer & Entertainment, Mbak Ve, Titi, Cini, Jems.

MOTTO

“Tabah Sampai Akhir”

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Noviana Putri

NIM: 140910101019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Sikap China Menolak Resolusi PBB UNEP/EA. 3/RES. 7 Tentang Pencemaran Sampah Plastik Di Wilayah Laut” adalah benar hasil buah fikir sendiri, terkecuali kutipan yang sudah saya lampirkan sumbernya, belum pernah diajukan pada lembaga atau institusi manapun, dan bukan karya ilmiah yang menjiplak dari karya orang lain. Saya bertanggung jawab terkait keabsahan dan kebenaran pada isi karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang sudah seharusnya dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mendapat sanksi akademik jika apa yang saya nyatakan tidak sesuai dengan kenyataan.

Jember, Februari 2019

Yang menyatakan

Noviana Putri

NIM: 140910101019

SKRIPSI

**SIKAP CHINA MENOLAK RESOLUSI PBB UNEP/EA. 3/RES. 7
TENTANG PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI WILAYAH LAUT**

***CHINA'S REJECTION OF UN RESOLUTION UNEP/EA.3/RES.7
CONCERNING POLLUTION OF PLASTIC WASTE IN THE SEA AREA***

Oleh:

Noviana Putri

NIM:140910101019

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Honest Dody Molasy S.Sos, MA.

Dosen Pembimbing Anggota : Adhiningasih Prabhawati, S.Sos. M, Si.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Sikap China Menolak Resolusi PBB UNEP/EA. 3/RES. 7
Tentang Pencemaran Sampah Plastik Di Wilayah Laut” telah diuji dan disahkan
pada:

hari, tanggal :

waktu :

tempat : Ruang Ujian Bersama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jember

Tim Penguji,

Ketua

RINGKASAN

Sikap China Menolak Resolusi PBB UNEP/EA. 3/RES. 7 Tentang Pencemaran Sampah Plastik Di Wilayah Laut; Noviana Putri; 140910101019; 2019; 89 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pencemaran sampah plastik dunia merupakan persoalan penting saat ini, terutama sampah plastik yang terbang ke laut. Jumlah sampah plastik yang terbang ke laut terus bertambah dari tahun ke tahun. Sebanyak 8,8 juta metrik ton sampah plastik terbang ke laut setiap tahunnya. Salah satu negara yang menyumbang sampah plastik terbanyak di lautan adalah China. China menyumbang sebanyak 3 juta metrik ton sampah plastik ke lautan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 PBB merumuskan Resolusi UNEP/EA.3/RES.7 mengenai sampah plastik di laut untuk menanggulangi persoalan sampah plastik di dunia. Namun China memilih untuk menolak menandatangani Resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 tentang pencemaran sampah plastik di laut. Sebagai negara penyumbang sampah plastik terbanyak, sikap China menolak menandatangani resolusi tersebut menimbulkan sorotan dari masyarakat dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan China menolak dalam penandatanganan resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 tentang pencemaran sampah plastik di laut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan permasalahan kemudian menganalisis objek penelitian secara mendalam. Data sekunder diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat disebut juga sebagai studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu buku cetak, buku elektronik, artikel ilmiah, jurnal ilmiah serta situs internet.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa alasan China menolak penandatanganan resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 adalah alasan kepentingan ekonomi China. Kepentingan ekonomi China meliputi pembangunan ekonomi dalam bidang industrialisasi terutama industri pengolahan plastik. China

merupakan pasar yang strategis untuk industri plastik, dan industri plastik memberi pendapatan yang signifikan terhadap GDP China. Jika menandatangani resolusi tersebut maka China harus mengikuti poin-poin aturan dalam resolusi yang berdampak pada penurunan produksi plastik dan pelemahan industri plastik dalam negeri.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu tercurahkan. Atas segala rahmat, petunjuk dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sikap China Menolak Resolusi PBB UNEP/EA. 3/RES. 7 Tentang Pencemaran Sampah Plastik Di Wilayah Laut”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardianto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen wali akademik yang telah membimbing penulis selama jadi mahasiswa.
3. Bapak Honest Dody Molasy, S.Sos, MA., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M. Si, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selalu sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Semua pihak yang mendukung kelancaran pengerjaan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Namun penulis berharap, apa yang disampaikan di dalam skripsi ini sedikit banyak akan bermanfaat. Teruntuk seluruh pembaca agar senantiasa menjaga lingkungan dengan mulai mengurangi konsumsi produk plastik sekali pakai.

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.3.1 Batasan Waktu	4
1.3.2 Batasan Materi	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Konseptual	5
1.5.1 Konsep <i>National Interest</i>	5
1.6 Argumen Utama	14
1.7 Metode Penelitian.....	14
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data.....	14
1.7.2 Teknik Analisis Data	15
1.8 Sistematika Penulisan.....	15
BAB 2 PERSOALAN SAMPAH DUNIA DAN PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT CHINA.....	16
2. 1 Kondisi Sampah Plastik di Dunia.....	17
2.1.2 Dampak dan Resiko Akibat Pencemaran Sampah Plastik di Laut	25

2.2 Pencemaran Sampah Plastik di China	30
BAB 3 RESOLUSI PBB UNEP/EA.3/RES.7TENTANG PERCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT.....	39
3.1 UN Environmental Programme (UNEP).....	39
3.2 UN Environmental Assembly (UNEA).....	44
3.2.1 Sejarah Terbentuknya UN Environmental Assembly.....	44
3.2.2 Peran UN Environment Assembly.....	46
3.3 Resolusi UN Tentang Pencemaran Sampah Plastik di Laut.....	47
BAB 4 ALASAN CHINA MENOLAK RESOLUSI PBB UNEP/EA. 3/RES.7 TENTANG PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT	58
4.1 Isi Resolusi Dapat Mengganggu Industrialisasi di China.....	58
4.2 Keterlibatan Negara-negara Maju Dalam Industri Plastik China.....	69
BAB 5 KESIMPULAN.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
Artikel dari Surat Kabar	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sumber Sampah Plastik di Uni Eropa	24
Gambar 2.2 Penyu yang terperangkap dalam jaring bekas di perairan Mediterania	27
Gambar 2.3 Bangkai burung laut yang mati akibat memakan sampah-sampah plastik di lautan	28
Gambar 4. 1 Perkembangan GDP China tahun 2013-2017	64
Gambar 4. 2 Persentase Distribusi GDP China Tahun 2017	65
Gambar 4. 3 Volume Ekspor Produk Plastik di China Tahun 2009-2017	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1Sepuluh Sungai Paling Tercemar di Dunia	25
Tabel 4. 1Pertumbuhan dan Pendapatan Produk-Produk Manufaktur Plastik di China Tahun 2017	63
Tabel 4.2 Negara-negara Yang Mengimpor Limbah Plastik Dunia Tahun 2016.....	71

DAFTAR SINGKATAN

ABS	: <i>Acrylonitrile-Butadiene Styrene</i>
COP	: <i>Conference of Parties</i>
GDP	: <i>Gross National Product</i>
NDRC	: <i>The National Development and Reform Commission</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PE	: <i>Polyethylene</i>
PET	: <i>Polyethylene Terephthalate</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNEA	: <i>United Nations Environment Assembly</i>
UNEP	: <i>United Nations Environmental Programme</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan antar negara-negara di dunia pada saat ini tidak lagi terbatas oleh batas jarak dan waktu, dimana proses globalisasi menjadikan seluruh dunia terhubung satu sama lain dan hampir tanpa batas. Hal ini yang membuat negara-negara di dunia terhubung dan menyatu antara satu dan lainnya. Hubungan yang semakin terbuka membuat negara semakin memahami apa saja yang menjadi permasalahan negara lain yang tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat dunia secara umum.

Sampah merupakan sesuatu permasalahan serius bagi masyarakat global saat ini terutama sampah dari plastik. Persentase laut dan daratan yang tercemar oleh sampah plastik semakin bertambah banyak dari waktu ke waktu. Sampah plastik sulit terurai oleh alam secara alami sehingga hal ini menjadi permasalahan yang serius bagi masyarakat global. Sebanyak hampir 8,8 juta metrik ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahunnya (Associated Press, 2015). Kehidupan manusia dewasa ini tidak dapat terlepas dari plastik karena plastik merupakan bahan yang fleksibel, ringan, serta murah. Oleh karena itu penggunaan plastik sebagai bahan utama untuk pembuatan barang-barang rumah tangga hingga alat-alat industri masih sangat banyak dan jumlahnya meningkat setiap tahunnya.

Grafik pencemaran sampah plastik di dunia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Studi *Worldwatch Institute* melaporkan bahwa pemakaian produk plastik di dunia diperkirakan mencapai 260 ton pada tahun 2008 dan meningkat sebanyak 39 ton dalam kurun waktu 5 tahun, menjadi 299 ton pada tahun 2013. Pada tahun 2016 kenaikan jumlah sampah mencapai 77% mencapai 1,3 miliar ton (Sasongko, 2017). Lebih dari 8 juta metrik ton sampah plastik terbuang ke laut setiap tahunnya, dan diperkirakan pada tahun 2025 terdapat lebih banyak sampah plastik daripada ikan di laut (Dennis, 2017).

Penggunaan bahan plastik ini diakibatkan oleh kemudahan dan daya tahan plastik yang perlahan mulai banyak menggantikan logam dan kaca sebagai bahan

baku pembuatan alat-alat rumah tangga maupun industri. Jumlah penggunaan bahan plastik dalam kehidupan sehari-hari berbanding lurus dengan jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakat global baik yang di daratan maupun yang terbuang ke laut. Isu sampah dan pencemaran laut ini merupakan isu penting yang perlu diperhatikan oleh semua negara di dunia.

Kebersihan dan kelangsungan kehidupan ekosistem laut merupakan hal penting yang harus dijaga dan dilestarikan, oleh karena itu negara-negara di dunia melalui *United Nations* (UN) merumuskan Resolusi PBB yang diorganisir oleh Badan Lingkungan PBB yaitu *United Nations Environment Assembly* (UNEA¹) tentang pencemaran sampah plastik di laut. Keadaan lingkungan dunia terutama di laut yang semakin hari semakin kritis akibat pembuangan sampah plastik di wilayah laut menimbulkan kerusakan ekosistem laut yang akan berdampak tidak hanya bagi wilayah laut yang tercemar namun juga akan menyebar ke seluruh wilayah laut di dunia. Pembentukan Resolusi PBB berawal dari keadaan laut di dunia yang semakin lama semakin banyak tercemar oleh sampah plastik yang sengaja dibuang ke laut.

Organisasi dunia seperti PBB melalui *UN Environmental Programme* telah mengkampanyekan beberapa program untuk mengurangi pembuangan sampah plastik di laut seperti *#BeatPollution*². Program-program tersebut semakin dikuatkan dengan perumusan Resolusi PBB mengenai sampah laut yang di bentuk oleh *UN Environment Assembly* di Nairobi, Kenya. Terdapat 13 resolusi yang dirumuskan dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah Resolusi UNEP/EA. 3/RES. 7 tentang penanganan dan pencegahan sampah laut dan mikroplastik. Draft resolusi tentang sampah laut dan mikroplastik memiliki tujuan pada tahun

¹Majelis Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah badan pembuat keputusan tingkat tinggi di dunia terhadap lingkungan yang membahas tantangan lingkungan kritis yang dihadapi dunia saat ini. Majelis Lingkungan bertemu dua tahunan untuk menetapkan prioritas untuk kebijakan lingkungan global dan mengembangkan undang-undang lingkungan internasional. Melalui resolusi dan ajakan bertindak, Majelis memberikan kepemimpinan dan mengkatalisasi tindakan antar pemerintah terhadap lingkungan. Pengambilan keputusan memerlukan partisipasi luas, oleh karena itu Majelis memberikan kesempatan kepada semua orang untuk membantu merancang solusi bagi kesehatan planet kita. (UN Environment Assembly Official Website, 2018, diakses melalui <http://web.unep.org/environmentassembly/about-un-environment-assembly>, pada tanggal 19 Februari 2018)

2025, untuk mencegah dan mengurangi pencemaran laut secara signifikan dari semua jenis, terutama dari kegiatan berbasis lahan termasuk puing-puing laut dan pencemaran nutrisi, sesuai dengan indikator dalam *Sustainable Development Goals* yang juga menjadi acuan perumusan resolusi tersebut (Messenger, 2017).

Menurut Ben Messenger dalam artikelnya yang berjudul *UN Environment Assembly Resolution to Tackle Plastic Waste & Marine Litter* pada tahun 2017 di dalam resolusi PBB terkait sampah plastik di laut terdapat beberapa seruan bagi negara-negara anggota yaitu:

1. Pentingnya penghapusan limbah dan mikroplastik jangka panjang ke lautan dan untuk menghindari kerusakan pada ekosistem laut dan aktivitas manusia yang bergantung padanya dari sampah laut dan mikroplastik.
2. Mendesak semua aktor untuk meningkatkan tindakan hingga "pada tahun 2025, mencegah dan mengurangi secara signifikan polusi laut dari semua jenis, terutama dari kegiatan berbasis lahan, termasuk puing-puing laut dan pencemaran nutrisi".
3. Mendorong semua negara anggota untuk memprioritaskan kebijakan dan tindakan pada skala yang tepat, untuk menghindari sampah laut dan mikroplastik memasuki lingkungan laut.

Negara-negara anggota PBB telah menyetujui Resolusi PBB/UNEP/EA. 3/RES. 7 mengenai pencemaran sampah plastik di laut, namun terdapat tiga negara yang menolak draft mengenai program tersebut yaitu China, Amerika Serikat dan India. Sebagai negara anggota, ketiga negara tersebut dengan tegas menolak untuk menandatangani Resolusi PBB/UNEP/EA. 3/RES. 7 tentang sampah plastik di laut. Sedangkan tujuan dari pembentukan Resolusi PBB mengenai sampah plastik di laut adalah untuk membebaskan lautan dari bahaya kerusakan lingkungan.

China sebagai salah satu negara yang menolak menandatangani Resolusi PBB tentang pencemaran sampah plastik di laut merupakan salah satu negara yang disoroti oleh dunia. Negara-negara di dunia menyoroti China karena merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar di wilayah laut. Sebanyak hampir 3 juta metrik ton sampah plastik di China dibuang ke laut setiap tahunnya,

hal ini yang membuat China menjadi negara nomor satu di dunia sebagai negara penghasil sampah plastik di laut (Jambeck, 2015). Hal ini menimbulkan pertanyaan sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait keputusan China untuk tidak menandatangani Resolusi PBB mengenai sampah plastik di laut.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Karena dalam sebuah penelitian fokus permasalahan ada pada perumusan masalah. Penulis dapat menjelaskan inti dari tulisan dengan rinci dan teratur melalui permasalahan yang ditentukan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa China menolak menandatangani Resolusi PBB/UNEP/EA. 3/RES. 7 mengenai sampah plastik di wilayah laut?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan sebagai koridor dan batasan penulis untuk menjelaskan isi dari penelitian. Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian membuat isi dari karya ilmiah menjadi fokus terhadap permasalahan yang diteliti. Ruang lingkup pembahasan dibedakan menjadi batasan waktu dan batasan materi.

1.3.1 Batasan Waktu

Penulisan karya ilmiah ini memiliki batasan waktu untuk membatasi dan memperjelas pembahasan dalam penelitian ini. Batasan waktu dalam karya ilmiah ini membatasi penelitian mulai tahun 2015 hingga tahun 2017. Pada tahun 2015 ketika program *Sustainable Development Goals* yang termasuk mengenai sampah plastik di laut diresmikan dan diadopsi oleh 193 negara anggota PBB termasuk China untuk masa periode 2015-2030. Sedangkan tahun 2017 didasarkan dari sikap China yang menolak Resolusi PBB/UNEP/EA. 3/RES. 7 yaitu pada tahun 2017 serta adanya data dan fakta yang dapat diteliti dipaparkan hanya dapat dilihat sebatas tahun 2017.

1.3.2 Batasan Materi

Batasan materi dalam penelitian ini diperlukan guna membatasi fokus pembahasan dalam karya ilmiah yang ditulis. Pembatasan ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah pada penjelasan mengenai Resolusi PBB dan sikap China menolak resolusi tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap China menolak Resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 terkait pencemaran sampah plastik di wilayah laut.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam sebuah karya ilmiah diperlukan adanya landasan teori yang berfungsi sebagai alat analisis dari sebuah permasalahan yang diteliti. Landasan teori ini diperlukan untuk membantu dalam menemukan jawaban dari penelitian. Adanya teori merupakan sebuah pedoman dalam penelitian. Jawaban yang didapat harus diteliti berdasarkan korelasi antara fenomena dan teori sebagai alat analisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan konseptual yaitu konsep *national interest*. Penelitian ini menggunakan teori atau konsep yang membahas keputusan China terkait kebijakannya tidak ikut serta dalam Resolusi PBB tentang sampah plastik di laut, hal ini relevan dengan konsep *national interest* yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini.

1.5.1 Konsep *National Interest*

National Interest atau kepentingan nasional merupakan langkah pertama yang menyangkut keberlangsungan negara. Asumsi dasar dari kepentingan nasional adalah kepentingan kolektif dari kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat dan kepentingan kolektif tersebut lebih penting dibanding dengan kepentingan individu-individu itu sendiri. Meskipun merupakan suatu hal yang fundamental yang terkait dengan kelangsungan hidup negara, namun kepentingan nasional bersifat elastis. Artinya kepentingan nasional akan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi baik domestik maupun dalam dunia internasional (Rochester, 1978:77-96).

Pada konsep *national interest* merupakan turunan dari teori besar dalam studi hubungan internasional yaitu teori realis. Dalam penelitian ini penulis mengacu pada teori realis menurut Hans J. Morgenthau. Aktor utama dalam kajian teori realisme yaitu negara, dianggap relevan dengan penelitian yang membahas mengenai keputusan negara China. Realisme hanya melihat keputusan aktor yaitu negara dalam perannya di dunia internasional dalam hubungan negara atau entitas yang sedang dikaji (Hara, 2011:39-41). Pemikiran yang mendasari Morgenthau dan mengidentifikasikannya sebagai pemikiran realis yaitu adanya ketidaksempurnaan dunia adalah akibat dari paksaan-paksaan yang menjadi sifat dasar manusia dan untuk mengembangkannya perlu adanya usaha dengan tekanan-tekanan tersebut, bukannya melawan hal tersebut (Linklater & Burchill, 2015:99-104).

Dalam buku Teori-Teori Hubungan Internasional yang ditulis oleh Scott Burchill dan Andrew Linklater (2015), Morgenthau mencatat enam prinsip realisme yang merumuskan pendekatan teori realisme terhadap hubungan internasional diantaranya:

1. Politik ditentukan oleh hukum-hukum objektif yang berakar pada kodrat manusia. Hukum-hukum ini memberi kepastian dan kepercayaan terhadap perhitungan atas sikap politik yang rasional.
2. Kunci untuk memahami politik internasional adalah mendefinisikan konsep kepentingan dalam kaitannya dengan kekuasaan.
3. Bentuk dan sifat kekuasaan negara akan bermacam-macam dalam waktu, tempat dan konteks tetapi konsep kepentingan masih tetap sama.
4. Prinsip-prinsip moral universal tidak menuntun sikap negara meski sikap negara jelas akan memiliki implikasi moral dan etika. Sikap hati-hati yang didasarkan pada penilaian bijaksana dari konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari pilihan politis alternatif adalah hukum yang menjadi pedoman kaum realis.
5. Tidak ada serangkaian prinsip-prinsip moral yang disetujui secara universal. Meski negara dari waktu ke waktu akan berusaha untuk

merubah sikap mereka dalam pengertian etis namun adanya bahasa moral untuk membenarkan sikap eksternal dirancang untuk merundingkan keuntungan, legitimasi dan selanjutnya kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan merupakan suatu hal yang akan menjadi dasar pertimbangan dan tujuan dalam setiap tindakan politik.

6. Secara intelektual bidang politik atau otonom dari setiap bidang perhatian, baik bidang yang bersifat legal, moral maupun ekonomi (Linklater & Burchill, 2015:99-104).

Realis melihat politik internasional merupakan sebuah perjuangan demi kekuasaan antar negara, dan pencarian demi kepentingan nasional merupakan sebuah aktivitas yang normal serta tidak dapat dihindari. Menurut Morgenthau kepentingan nasional adalah kondisi permanen yang memberikan panduan secara rasional untuk para pembuat kebijakan dalam bertindak. Kepentingan nasional tidak didefinisikan oleh perilaku manusia atau sikap memihak suatu partai tetapi merupakan suatu data yang objektif pada semua manusia yang menerapkan kemampuan rasional mereka bagi terlaksananya kebijakan luar negeri (Linklater & Burchill, 2015:99-104).

Perkembangan pemikiran realis membuat tokoh pemikir realis seperti E. H. Carr dan Hans J. Morgenthau menegaskan bahwa pemikiran realis ini akan berkaitan dengan sejumlah penjelasan empiris dan normatif diantaranya negara berdaulat adalah pelaku utama sekaligus sebagai unit analisis, sikap negara-intra (dominan) berlaku dalam sebuah lingkungan yang tidak dapat dicegah dan sikap negara yang dapat dipahami secara rasional sebagai pencarian kekuasaan yang didefinisikan sebagai sebuah kepentingan. Realisme adalah sebuah kepentingan nasional yang diungkapkan oleh bukti sejarah sebagaimana yang tercermin dalam pemikiran kita (Linklater & Burchill, 2015:99-104).

Pengambilan keputusan oleh pemerintah berpengaruh terhadap sikap suatu negara sebagai aktor internasional. Hal ini juga berlaku untuk China sebagai aktor internasional, China juga memiliki perannya sendiri dalam dunia internasional dan hal itu terpengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sebuah negara. Kepentingan nasional (*National Interest*) pada dasarnya merupakan tiap-tiap

apapun yang diperlukan negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan seperti kesejahteraan rakyatnya dalam semua sektor baik ekonomi, sosial dan politik. Morgenthau menjelaskan konsep *national interest* dalam konteks *power* atau kekuatan yaitu penggunaan kekuasaan secara bijaksana untuk menjaga berbagai kepentingan yang dianggap paling vital bagi kelestarian bangsa (Mas'ood, 1994:23). Dalam perannya di dunia internasional, negara akan melakukan apapun yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasionalnya. *National interest* pada dasarnya digunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara (Sitepu, 2011:9-10).

Setiap negara pada dasarnya memiliki kepentingan nasional yang digunakan sebagai acuan dan tujuan terkait eksistensi sebuah negara dalam dunia internasional. Konsep kepentingan nasional juga berkaitan erat dengan kemampuan negara untuk keberlangsungan hidupnya. Mengutip pendapat Hans J. Morgenthau mengenai kemampuan negara yang paling kecil sekalipun adalah melindungi identitas fisik, politik dan identitas budaya nasional dari gangguan pihak lain. Penjelasan lain mengatakan bahwa negara harus bisa mempertahankan integritas wilayahnya (*physical identity*), mempertahankan identitas politik (*political identity*), mempertahankan rezim-rezim ekonomi-politiknya contohnya seperti demokratis, komunis, kapitalisme, sosialisme, otoriter dan lain-lain (Sitepu, 2011:16-18). Menurut pendapat Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan sebuah kompromi dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bersaing. Implementasi dari kepentingan-kepentingan tersebut dituangkan dalam kebijakan yang nantinya akan ditunjukkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Nuechterlain, 1976:246-248).

Kepentingan nasional suatu negara harus selalu bersesuaian dengan kemampuan negara tersebut jika dilihat dari cakupannya. Kompromi-kompromi dari kepentingan politik dari kelompok atau kelas elit harus memperhatikan kemampuan negara untuk mencapai hal tersebut. Sebuah negara adalah aktor politik internasional, hal tersebut membuat negara harus pula memperhatikan kepentingan nasionalnya dengan kepentingan-kepentingan negara lainnya. Kesadaran dan perhatian terhadap kepentingan negara lain akan menimbulkan

keseimbangan dalam kehidupan dunia internasional terkait kelangsungan masing-masing negara. Setiap negara dan kepentingannya hendaknya tidak hanya menyadari kepentingannya sendiri tetapi juga memperhatikan kepentingan bangsa lain, meskipun hal ini bukan merupakan suatu keputusan yang mutlak karena pada dasarnya setiap negara akan selalu mendahulukan kepentingan nasionalnya sendiri, sehingga bukan serta merta sebuah negara akan memperhatikan kepentingan negara lain atau hal-hal yang bersifat universal diluar kepentingan nasionalnya (Nuechterlain, 1976:246-248).

Donald E. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional secara lebih rinci dengan menguraikan beberapa hal yaitu pertamamentang persepsi negara bahwa keputusan yang ada dalam suatu negara merupakan bagian dari proses politik yang dilihat dari pandangan pemimpin negara atau pemerintah terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan dan kesimpulan mengenai suatu isu atau permasalahan tertentu, kedua adalah definisi tentang hubungan dengan negara-negara berdaulat lainnya terkait aliansi dan organisasi-organisasi internasional, ketiga yaitu membedakan antara kepentingan eksternal dan internal (domestik) negara(Nuechterlain, 1976:246-248).Definisi-definisi ini menjelaskan tentang kepentingan nasional secara keseluruhan bukan kepentingan bagi sebagian kelompok atau organisasi politik tertentu. Terdapat beberapa hal-hal mendasar dalam kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlain dalam jurnalnya yang berjudul *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making*(1976), yaitu:

1. Kepentingan Pertahanan: perlindungan negara-bangsa dan warganya terhadap ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain, dan / atau ancaman yang dariluar terhadap sistem pemerintahannya.
2. Kepentingan Ekonomi: peningkatan kesejahteraan ekonomi negara-bangsa dalam hubungan dengan negara-negara lain.
3. Kepentingan Tatanan Dunia (*World Order*): pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara-bangsa mungkin merasa aman,

dan di mana warga internasional dan roda perdagangan dapat beroperasi secara damai di luar perbatasannya negara.

4. Kepentingan ideologis: perlindungan dan kelanjutan dari serangkaian nilai yang orang-orang dari negara-bangsa berbagi dan percaya untuk menjadi baik secara universal.

Keempat hal tersebut merupakan hal-hal yang dipertimbangkan negara untuk memutuskan kebijakan luar negerinya agar tetap seiring dengan kepentingan nasional yang berusaha dicapai. Studi kasus sikap China yang menolak resolusi UNEP/EA.3/RES.7 lebih menekankan pada kepentingan ekonomi. Ekonom neoklasik percaya bahwa rezim otonom seharusnya memiliki tujuan untuk menciptakan dan melindungi sistem pasar yang relatif kompetitif untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien. Sedangkan lainnya melihat negara memainkan peran yang lebih penting dalam membawa perubahan struktural melalui kebijakan industri, misalnya, untuk melindungi industri tertentu (Grabowski, 2000:270).

Negara berkembang tidak hanya berakar pada struktur sosial dan ekonomi pembangunan yang ada, tetapi juga dalam struktur sosial dan ekonomi masa depan. Hal ini umumnya melibatkan pembangunan atau pembangunan kembali identitas ekonomi nasional yang menuntut negara untuk menjadi agak otonom. Artinya bahwa negara dapat membangun serangkaian tujuan dan kebijakan yang terlepas dari kepentingan kelompok-kelompok kepentingan khusus yang ada saat ini. Transformasi ekonomi yang diusulkan oleh negara otonom bukanlah sebuah tujuan melainkan sarana untuk mencapai tujuan keseluruhan yang melibatkan rekonstruksi identitas nasional. Oleh karena itu transformasi ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat (Grabowski, 2000:274). Menurut Richard Grabowski negara berkembang tidak dogmatis dalam hal mengejar tujuannya, tetapi justru sangat pragmatis. Jika kebijakan tertentu ternyata tidak efektif, mereka dengan cepat disesuaikan atau diubah dan ini berlanjut sampai kesuksesan tercapai. Namun, selama proses ini negara mendominasi dalam menetapkan tujuan dan membuat kebijakan. Perusahaan dan

industri dihargai untuk pencapaian ekonomi yang sukses (biasanya keberhasilan ekspor menjadi salah satu dari banyak ukuran kinerja) (Grabowski, 2000:274).

Dalam jurnal Richard Grabowski yang berjudul *The State and the National Economic Interest*(2000), Weiss telah menekankan saling ketergantungan negara dan bisnis dan menyebutnya teori saling ketergantungan yang diatur, yang melihat negara dan kelompok ekonomi dan sosial yang dominan sama kuatnya. Meskipun saling ketergantungan biasanya merupakan karakteristik hubungan antara pemerintah dan bisnis, dari perspektif saling ketergantungan yang diatur ini negara mengambil peran yang sangat aktif dalam menarik bisnis ke dalam hubungan untuk mencapai tujuan nasionalnya (Grabowski, 2000:275). Dengan demikian negara tidak hanya perlu efektif, tetapi juga memiliki kepentingan ekonomi nasional jangka panjang sebagai tujuannya. Negara cukup otonom untuk mendefinisikan serangkaian kepentingan atau proyek sosial independen dari kelompok kepentingan ekonomi dan sosial yang penting. Tujuan yang dikejar oleh negara adalah tujuan kolektif yang melibatkan merekonstruksi identitas nasional, dan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Grabowski, 2000:275).

Terdapat tiga sektor yang membentuk ekonomi suatu negara yaitu sektor primer (termasuk pertanian, perikanan, dan pertambangan), sektor jasa (termasuk perhotelan, konsultasi dan keperawatan) dan sektor industri (manufaktur dan konstruksi). Sektor industri adalah sektor yang membuat produk lengkap yang kemudian dapat dimanfaatkan (Grabowski, 2002:311). Para ekonom berpendapat bahwa industri manufaktur menciptakan kekayaan dibandingkan dengan sektor jasa. Sektor jasa dianggap sebagai konsumen kekayaan. Negara-negara yang mengekspor barang-barang manufaktur biasanya ditemukan memiliki pertumbuhan GDP marjinal yang lebih tinggi karena manufaktur mendorong pembangunan ekonomi (Grabowski, 2002:311). Industri memainkan peran yang kompleks dalam pembangunan ekonomi. Menurut Carlos Humberto Oriz dalam jurnalnya yang berjudul *Industrialization and Growth: Threshold Effect of Technological Integration* (2009) terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan eksternalitas ekonomi yang kuat dari sektor manufaktur yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan Nasional

Industrialisasi memungkinkan negara memanfaatkan sumber daya mereka secara optimal. Hal ini dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas barang yang diproduksi oleh perusahaan. Industrialisasi memiliki kontribusi pada produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Telah dinyatakan bahwa industrialisasi melalui investor asing dapat memberikan efek positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi.

2. Standar Hidup yang Lebih Tinggi

Dalam masyarakat industri tenaga kerja menjadi lebih berharga. Hal ini karena produktivitas yang lebih tinggi, sehingga pendapatan individu meningkat. Peningkatan pendapatan ini dapat meningkatkan standar hidup orang-orang biasa.

3. Stabilitas Ekonomi

Negara yang bergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas dan berfluktuasi untuk produk pertanian dan bahan mentah dapat menghambat kemajuan ekonomi dan mengarah pada ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu industrialisasi merupakan cara terbaik untuk memberikan stabilitas ekonomi karena industrialisasi mengeksport produk-produk jadi siap pakai.

4. Peningkatan Neraca Pembayaran

Industrialisasi mengubah pola perdagangan luar negeri di dalam negeri. Hal ini meningkatkan ekspor barang-barang manufaktur, yang lebih menguntungkan dalam valuta asing. Tetapi pada saat yang sama, memproses bahan mentah di dalam negeri membatasi impor barang, sehingga membantu menghemat devisa. Efek orientasi ekspor dan substitusi impor dari industrialisasi membantu meningkatkan neraca pembayaran.

5. Kemajuan yang Dirangsang di Sektor Lain

Industrialisasi merangsang kemajuan di sektor-sektor ekonomi lainnya. Perkembangan dalam satu industri mengarah pada pengembangan dan perluasan industri terkait. Sektor manufaktur ditandai dengan aplikasi intensif sains dan teknologi untuk mengubah barang setengah jadi dan bahan mentah menjadi

barang jadi. Hal ini juga berdampak terhadap rangsangan kemajuan dalam sektor lainnya baik dalam hal produksi maupun distribusi.

6. Peluang Kerja Meningkat

Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja di industri skala kecil dan besar. Dalam ekonomi industri, industri menyerap pekerja yang menganggur, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Kerangka konseptual kepentingan nasional ini digunakan untuk menjelaskan alasan China menolak resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 tentang pencemaran sampah plastik di laut. Pemerintah sebagai aktor pembuat kebijakan perlu memilah-milah dan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dirasa penting dan sesuai dengan kepentingan nasionalnya, dari analisa tersebut barulah pemerintah dapat menentukan kebijakan dan sikapnya dalam dunia internasional. Setiap negara memiliki kepentingan-kepentingan mendasar termasuk China, untuk menunjang tujuan-tujuan yang akan dicapai. Dalam kasus sikap China menolak Resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 ini China perlu melihat kepentingan apa saja yang sesuai dan hal-hal apa saja yang terpengaruh dalam sikapnya untuk menolak atau tidak dalam Resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7. Sebagai negara penghasil sampah plastik di laut, China tentu memiliki kebijakan untuk menanggulangi jumlah sampah plastik di wilayah perairannya karena hal tersebut dipertimbangkan dalam kepentingan menyangkut tatanan dunia. Namun demikian kebijakan yang dibuat tidak serta merta hanya atas satu pertimbangan saja melainkan beberapa faktor dan kesesuaian terhadap kepentingan utama China itu sendiri.

Kepentingan nasional pasti dimiliki oleh setiap negara-negara di dunia sebagai aktor internasional, begitu juga negara China. Sikap dan kebijakan domestik maupun luar negeri China akan selalu didasarkan pada kepentingan nasional yang menjadi tujuan negaranya. Sikap yang ditunjukkan China terkait penolakan Resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 mengenai sampah plastik di laut merupakan salah satu bentuk dari penerapan usaha-usaha untuk mencapai kepentingan nasional negara China.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan teori diatas, argumen yang di dapat untuk mengkaji penelitian lebih jauh mengenai sikap China yang menolak Resolusi PBB UNEP/EA. 3/RES. 7 tentang sampah plastik di wilayah laut yaitu karena resolusi tersebut dapat merugikan industri plastik di China. Dalam hal ini pemerintah China menganggap isi resolusi dapat merugikan usaha untuk mencapai tujuan industrialisasi yang diperjuangkan oleh China.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang penting dalam penelitian. Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Metode penelitian adalah bagian panduan bagi peneliti yang berisi tentang urutan bagaimana penelitian dilakukan (Nazir, 2009:13).

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer maupun sekunder untuk kebutuhan penelitian. Data yang telah dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat disebut sebagai studi kepustakaan. Peneliti melakukan survei terhadap data yang telah ada dan menggali teori-teori yang telah berkembang sebelumnya (Nazir, 2009:13-19). Untuk mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yaitu:

1. Perpustakaan Universitas Jember
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Sumber data sekunder dalam penelitian di dapatkan dari:

1. Buku, Jurnal dan Artikel Ilmiah
2. Media Cetak
3. Situs Internet

1.7.2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif biasa disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Penelitian ini meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012:26-29). Penelitian kualitatif menghasilkan penelitian yang menekankan pada makna yang mendalam. Pada teknik penelitian ini penulis diharuskan untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan objek penelitian secara mendalam.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 Persoalan Sampah Dunia Dan Pencemaran Sampah Plastik Di Laut

China

Bab ini membahas tentang persoalan sampah plastik dunia terutama yang berada di perairan. Pembahasan mengenai negara China juga dijelaskan dalam bab ini, khususnya menyinggung persoalan sampah plastik di wilayah perairan China, negara China sebagai negara penyumbang sampah plastik di wilayah laut. Penjelasan berikutnya mengenai dampak dari jumlah sampah plastik tersebut dan sikap pemerintah China terhadap kondisi sampah plastik yang ada di China.

BAB 3 Resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 Tentang Pencemaran Sampah

Plastik Di Laut

Bab ini membahas mengenai badan lingkungan UN yaitu UN Environmental Programme, UN Environmental Assembly dan resolusinya terkait sampah plastik di laut. Program lingkungan yang dibahas yaitu Resolusi PBB UNEP / EA.3 / RES. 7 tentang pencemaran sampah plastik di laut.

BAB 4 Alasan China menolak Resolusi PBBUNEP / EA.3 /RES. 7 tentang Pencemaran Sampah Plastik di Laut

Bab ini membahas tentang alasan China yang menolak Resolusi PBBUNEP/EA. 3/RES. 7 mengenai pencemaran sampah plastik di wilayah laut.

BAB 5 Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari uraian yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2

PERSOALAN SAMPAH DUNIA DAN PENCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT CHINA

Persoalan sampah dunia merupakan permasalahan yang sangat penting bagi negara-negara di seluruh dunia, hal ini karena keadaan dunia yang saat ini saling terhubung satu sama lain membuat permasalahan di salah satu belahan dunia juga turut menjadi permasalahan di belahan yang lain. Oleh sebab itu perlu perhatian lebih terhadap permasalahan sampah di dunia. Pada bab sebelumnya telah disinggung mengenai persoalan sampah di dunia khususnya sampah jenis plastik yang dibuang di lautan.

Beberapa negara masuk ke dalam kelompok negara-negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia, salah satunya negara China yang menempati urutan pertama sebagai negara dengan penghasil sampah plastik terbesar di laut. Sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar dilaut semestinya China juga menjadi pelopor dalam penanggulangan sampah plastik tersebut, mengingat persoalan sampah apalagi di laut juga dapat menyebar dan merusak lingkungan sekitar. Namun demikian PBB melalui *UN Environment Programme* mengeluarkan resolusi mengenai sampah plastik di laut, China menjadi salah satu negara yang tidak ikut menandatangani resolusi tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam sehingga memunculkan pertanyaan mengapa China tidak menandatangani resolusi tersebut.

Pembahasan dimulai dengan keadaan dunia dalam menghadapi persoalan sampah-sampah plastik dan penjelasan tentang dampak yang akan dihadapi dunia dengan banyaknya sampah plastik di wilayah laut.

Kenyataan mengenai jumlah sampah plastik di dunia serta dampak yang mengikutinya tentu tidak dapat dibiarkan. Selain resolusi PBB yang telah dirumuskan, negara-negara di dunia setidaknya juga memiliki program atau sistem tertentu untuk menanggulangi masalah sampah ini. Oleh sebab itu penjelasan selanjutnya adalah tentang sikap negara-negara di dunia terhadap persoalan sampah plastik di negaranya maupun secara global, termasuk gerakan-gerakan dan kampanye yang dilakukan oleh pihak-pihak diluar organisasi internasional terkait pencemaran sampah plastik di wilayah laut.

Pencemaran sampah plastik dunia akan lebih mengerucut lagi pada penjelasan mengenai studi kasus pencemaran sampah di negara yang diambil yaitu negara China. China merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar di wilayah laut menurut laporan dari Jenna R. Jambeck pada tahun 2015 (Jambeck et al., 2015). Hal ini menjadi pembahasan penting untuk mengulas lebih jauh mengenai produksi sampah yang dihasilkan China dalam beberapa waktu terakhir. Ulasan mengenai kondisi sampah plastik di China akan berkaitan dengan inti penelitian yaitu kebijakan China yang tidak ikut serta dalam penandatanganan resolusi PBB tentang pencemaran sampah plastik di wilayah laut. Oleh karena itu dalam bab ini dibahas secara mendalam mulai dari lingkup dunia hingga ke lingkup negara China.

2. 1 Kondisi Sampah Plastik di Dunia

Pencemaran lingkungan adalah kondisi ketika terjadi perubahan dari kondisi awal menjadi kondisi baru yang lebih buruk dari awalnya. Perubahan kondisi tersebut diakibatkan karena masuknya bahan-bahan pencemar yang bersifat racun (*toxic*) dan umumnya berbahaya bagi ekosistem makhluk hidup di wilayah tersebut (Rudy, 2003). Sampah plastik merupakan persoalan pencemaran oleh plastik yang telah ada sejak dahulu. Plastik merupakan bahan yang murah, ringan dan fleksibel sehingga membuat plastik menjadi bahan baku utama yang digemari dalam pembuatan alat-alat rumah tangga. Penggunaan plastik sebagai bahan baku peralatan rumah tangga dan peralatan sehari-hari membuat jumlah sampah plastik semakin bertambah. Meskipun plastik merupakan bahan yang murah, ringan serta fleksibel namun bahan plastik memiliki kekurangan yaitu

susah terurai dalam tanah. Kegiatan sehari-hari manusia merupakan sumber utama adanya sampah di dunia, hal ini karena kegiatan manusia menghasilkan pencemaran akibat pembuangan sampah baik di wilayah darat maupun laut. Jumlah sampah yang ada di dunia baik sampah plastik maupun sampah lainnya berkaitan dengan jumlah populasi masyarakat dunia serta kegiatan ekonomi masyarakat.

2.1.1 Jumlah Sampah Plastik di Dunia

Pencemaran plastik pertama kali dilaporkan oleh para ilmuwan pada tahun 1970, dimana kurang dari 50 tahun yang lalu bahan plastik pertama kali diproduksi secara komersil (Law, 2017). Hal ini kemudian diungkapkan oleh laporan dari Jenna R. Jambeck 40 tahun kemudian berdasarkan data yang diperoleh dari mengaitkan antara kepadatan penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat menghasilkan sekitar 275 juta metrik ton sampah yang dihasilkan oleh 192 negara dan hampir 4,8 juta-12,7 juta metrik ton sampah tersebut terbang ke laut sepanjang tahun 2010. Menurut laporan Bank Dunia bahwa terdapat hampir 1,75 juta ton sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dunia setiap harinya dan jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan naiknya populasi masyarakat dunia (Goto, 2013). Jumlah tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan sampah yang dihasilkan masyarakat dunia dalam sehari, sedangkan jumlah sampah plastik sendiri mencapai hampir 300 juta ton dihasilkan setiap tahunnya dan rata-rata sekitar 8 juta ton sampah plastik dibuang dan mengendap di laut (Ferris, 2017).

Sampah plastik yang berada di laut merupakan sampah yang mengapung dan mengendap di dasar lautan. Salah satu contoh sampah yang mengapung di laut adalah sampah tutup botol plastik yang memiliki massa jenis lebih ringan daripada air sehingga dapat mengapung di lautan. Contoh sampah plastik yang mengendap di dasar laut yaitu botol minuman dimana benda tersebut memiliki berat jenis sekitar 1.39 gr.cm^{-3} yang lebih berat daripada berat jenis air sehingga dapat tenggelam dan tinggal di dasar laut (Pravettoni, 2016).

Studi yang dikemukakan oleh Jenna R. Jambeck bahkan menghitung jumlah sampah plastik yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan yang ada di 192 negara di dunia (93% populasi penduduk dunia) dari 1,3 miliar metrik ton

sampah plastik dihasilkan oleh sebanyak 3 miliar orang-orang di daerah perkotaan(Jambeck et al., 2015). Pada wilayah pesisir pantai pada tahun 2010 sebanyak 99,5 juta metrik ton sampah dihasilkan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir dengan klasifikasi sebanyak 31,9 juta metrik ton merupakan sampah tidak terkelola dengan benar(Jambeck et al., 2015). Data tersebut menyebutkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dunia sangat besar, bahkan jika dibiarkan terus menerus maka dalam beberapa waktu kedepan diprediksi akan ada lebih banyak sampah daripada populasi manusia di dunia dan populasi ikan di laut. Produksi plastik global rata-rata mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dilihat dari tahun 1960 yang hanya sebanyak 5 juta ton per tahun menjadi 280 juta ton pertahun dalam kurun waktu 51 tahun(Gall and Thompson, 2015).

Beberapa studi menyatakan bahwa diprediksi pada tahun 2025 akan terdapat sebanyak 17,5 juta ton sampah plastik yang akan memasuki laut jika diakumulasikan dari tahun 2015 (Ferris, 2017). Terdapat beberapa negara di dunia yang termasuk dalam negara-negara penyumbang sampah plastik terbesar di laut, diantaranya yaitu China, Indonesia dan Amerika Serikat. Sebanyak 20 negara di urutan teratas sebagai negara penyumbang terbesar sampah plastik di laut bertanggungjawab terhadap 83% jumlah sampah plastik di perairan dunia. China sebagai negara di urutan pertama menyumbang hampir 1,32-3,53 juta metrik ton sampah plastik di wilayah laut setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor pendukung berupa jumlah penduduknya yang besar sehingga membuat produksi sampah meningkat terus. Sedangkan di Indonesia sebagai negara urutan kedua penghasil sampah terbesar terdapat sebanyak 0,48-1,29 juta metrik ton sampah terbuang ke laut dengan persentase sekitar 10% sampah yang dihasilkan merupakan sampah tidak terkelola dengan benar(Ferris, 2017).

Negara-negara yang termasuk dalam 20 besar negara penghasil sampah terbesar di dunia di dominasi oleh negara-negara berkembang, yang dianggap jumlah sampah ini berkaitan dengan tindakan pemerintah yang mengesampingkan pengolahan sampah dan lebih mendahulukan sektor-sektor ekonomi yang menunjang pertumbuhan dan kesejahteraan negara. Namun asumsi ini tidak sepenuhnya benar karena terdapat negara yang tergolong maju seperti Amerika

Serikat dan Turki yang juga masuk dalam kategori 20 besar negara penghasil sampah plastik terbesar, hal ini diperkirakan berasal dari penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari masyarakat yang begitu besar. Meskipun rata-rata negara maju memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik namun penggunaan plastik sekali pakai merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap jumlah sampah plastik di negara tersebut (BBC News, 2015).

Fakta-fakta di lapangan telah menunjukkan jumlah sampah yang signifikan terutama di wilayah perairan. Jumlah sampah dan dampak kerusakan-kerusakan yang dihasilkan dari banyaknya sampah membuat negara-negara di dunia tidak tinggal diam melihat kenyataan ini. Negara-negara yang tergolong maju telah memiliki sistem pengolahan sampah yang baik dengan cara memilah limbah rumah tangga yang dapat mengurangi sebagian sampah di negaranya, meskipun belum secara signifikan menghentikan laju pencemaran sampah plastik namun hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang masih fokus pada sektor ekonomi dan pembangunan.

Kesadaran penduduk dunia terhadap krisis sampah menghasilkan beberapa kampanye dan program bersama untuk menanggulangi persoalan sampah seperti adanya kampanye *#BeatPollution*³. Selain itu kampanye lingkungan lainnya yang dibentuk oleh masyarakat serta kelompok-kelompok pemerhati lingkungan

³*#BeatPollution* adalah kampanye lingkungan yang dibentuk oleh PBB khususnya dewan lingkungan PBB (*United Nations Environmental Assembly*) yang bertujuan mengajak masyarakat dunia untuk mendukung target dari program *Sustainable Development Goals 14 Life Below Water* tentang kehidupan bawah laut terutama mengenai polusi laut akibat sampah di laut. Kegiatan ini memiliki target utama yaitu mengurangi pencemaran laut dalam bentuk apapun secara signifikan. Kampanye ini ditujukan pada seluruh masyarakat dunia baik individu maupun organisasi. (UN Environment World Conservation Monitoring Centre Official Website, 2018, *Helping to #BeatPollution*, diakses melalui <https://www.unep-wcmc.org/featured-projects/helping-to-beatpollution> pada tanggal 24 Mei 2018)

yaitu *#CleanSeas*⁴dimana kampanye ini juga termasuk kampanye yang berfokus untuk membangun kesadaran masyarakat tentang kebersihan laut di dunia. Secara spesifik beberapa negara merilis jumlah sampah plastik yang mereka hasilkan baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek. Uni Eropa melalui *Institute for European Environmental Policy* yang bekerja sama dengan *AEA Energy & Environment* merilis laporan pada bulan April 2011 yang menyatakan bahwa pertumbuhan jumlah sampah secara global lebih besar dibandingkan pertumbuhan jumlah sampah di wilayah Eropa.

Jumlah sampah ini diperkirakan disumbang oleh wilayah Asia yang menyumbang hampir sebanyak 38% dari jumlah sampah global secara keseluruhan. Uni Eropa menghasilkan sebanyak 25% sampah plastik dunia, dan Jerman menjadi negara anggota Uni Eropa yang menghasilkan sampah terbanyak yaitu 8% dari jumlah keseluruhan sampah yang dihasilkan Uni Eropa (Institute for European Environmental Policy, 2011). Pertumbuhan jumlah sampah tersebut terus bertambah seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Laporan jumlah sampah di Uni Eropa di dominasi oleh sampah plastik yang berasal dari konsumsi barang-barang plastik sekali pakai seperti kemasan dan kantong plastik. Wilayah Eropa sendiri pada tahun 2011 dalam skala 100% terdapat sekitar 38% dari jumlah sampah merupakan sampah plastik, dimana lebih dari setengah dari jumlah tersebut bersumber dari penggunaan dalam rumah tangga dan sisanya digunakan dalam pengemasan untuk industri (Institute for European Environmental Policy, 2011). Penggunaan plastik kemasan dalam rumah tangga jauh lebih banyak daripada penggunaan kemasan untuk keperluan industri, hal ini karena kemasan-kemasan plastik yang terdistribusi dalam level

⁴*#CleanSeas* merupakan gerakan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengurangi sampah laut. Kebutuhan akan tindakan berbeda di berbagai belahan dunia. Infrastruktur pengelolaan sampah yang tepat masih kurang di beberapa daerah, sementara di tempat lain tantangan melibatkan kesadaran masyarakat umum tentang dampak sampah terhadap lingkungan. Sehingga adanya kampanye ini diharapkan dapat mengajak seluruh lapisan masyarakat di dunia untuk ikut menjaga lingkungan khususnya lautan agar terus terjaga dari pencemaran akibat sampah. (UN Environment Programme Official Website, *The Clean Seas Global Campaign on Marine Litter*, 2018, diakses melalui <http://web.unep.org/about/majorgroups/news/clean-seas-global-campaign-marine-litter> pada tanggal 24 Mei 2018)

rumahtangga sebagian besar merupakan produk kemasan sekali pakai sehingga tidak bertahan lama. Jumlah sampah plastik di Eropa yang berasal dari kemasan pada tahun 2015 melonjak sebanyak 21% dari keseluruhan sampah plastik yang ada pada tahun sebelumnya (Gambar 2.1). Kemasan yang digunakan dalam dunia industri sebaliknya berjumlah jauh lebih sedikit daripada penggunaan dalam rumahtangga karena kemasan yang digunakan merupakan kemasan-kemasan yang memang dirancang untuk digunakan kembali sehingga dapat bertahan hingga 10-15 tahun lamanya.

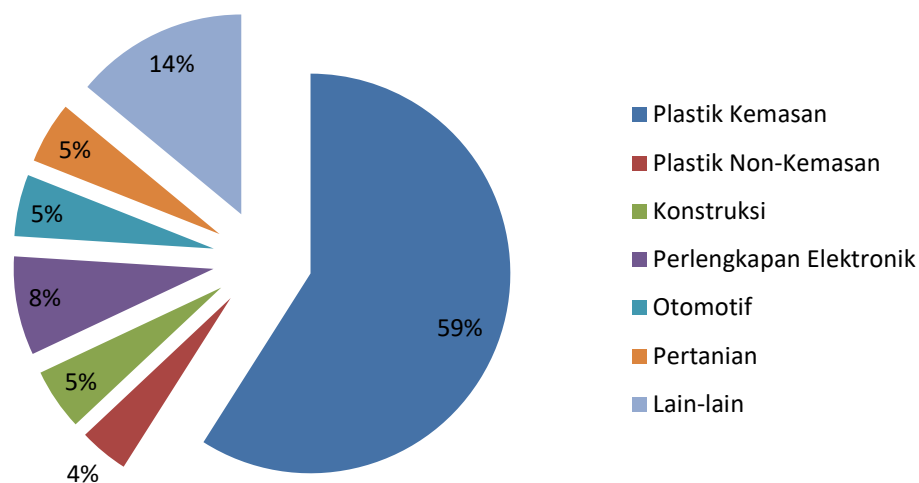
Kerusakan lingkungan akibat pencemaran sampah plastik berkaitan erat dengan pola produksi dan konsumsi masyarakat. Sampah yang telah dihasilkan tidak dikelola secara maksimal, sedangkan konsumsi masyarakat terus berjalan dan bahkan semakin tinggi dari waktu ke waktu. Hal ini juga berpengaruh terhadap degradasi lingkungan karena pengelolaan yang tidak maksimal membuat sampah plastik banyak terbuang dan bermuara ke laut. Data tahun 2015 di Eropa menyatakan bahwa kemasan sekali pakai merupakan penyumbang utama dan terbesar (Gambar 2.1). Sebanyak 59% merupakan sampah yang berasal dari kemasan, bidang pertanian, otomotif dan konstruksi masing-masing menyumbang 5%, bidang elektronik menyumbang sebanyak 8%, sedangkan sampah rumahtangga non-kemasan menyumban hanya 4%, dan sisanya sampah yang berasal dari bidang-bidang lainnya. Jumlah sampah plastik diperkirakan akan meningkat dari waktu ke waktu karena sampah yang telah terbuang akan sulit bahkan dalam beberapa kasus tidak akan terurai, sedangkan produksi dan konsumsi barang serta kemasan plastik terus berjalan (Gall and Thompson, 2015).

Pada saat ini, dunia yang sedang mengalami krisis sampah plastik perlu menyadari bahwa sampah-sampah yang tampak di permukaan sekitar 246.000 ton, namun di dalam lautan termasuk sampah-sampah yang telah mengendap terkubur di dasar laut terdapat lebih dari 360 juta ton sampah plastik. Perhitungan menunjukkan bahwa hampir 36 juta ton sampah tersimpan menjadi endapan di bawah laut (Moore, 2018). Sampah rumahtangga dan sampah plastik sekali pakai tidak hanya banyak menyumbang pencemaran di Eropa, tetapi juga Amerika Serikat. Sebanyak 35% dari permintaan atas kemasan plastik di Amerika Serikat

dari seluruh permintaan pasar dunia terhadap plastik kemasan sekali pakai. Sejumlah 12,8% limbah padat dari seluruh limbah di Amerika Serikat dihasilkan oleh masyarakat di perkotaan saja di Amerika Serikat pada tahun 2013, hal ini karena semua bahan-bahan kebutuhan rumah tangga memakai plastik sebagai kemasan yang memang dirancang hanya untuk sekali pakai saja.

Penggunaan kemasan sekali pakai didukung dengan pertimbangan kepraktisan yang ditawarkan dari kemasan plastik tersebut. Penggunaan kantong plastik di Amerika Serikat terdapat hampir 90 miliar kantong plastik yang digunakan setiap tahun, sedangkan jumlah lebih kecil sekitar 30 miliar kantong plastik digunakan di Jepang setiap tahunnya (Shao et al., 2014). Meski begitu sebelumnya Amerika Serikat juga mengembangkan proses daur ulang termoplastik dimana limbah-limbah plastik tersebut dileburkan pada tahun 2012, namun hanya sekitar 8,8% dari seluruh limbah plastik di Amerika Serikat yang dapat dileburkan. Berbeda dengan proses daur ulang di Eropa yang dapat mencapai 30% dari jumlah keseluruhan sampah yang dihasilkan. Negara-negara maju mengalami hambatan dalam proses daur ulang meskipun memiliki teknologi yang tergolong mumpuni. Hambatan tersebut diantaranya tidak tersedianya titik pengumpulan, kontaminasi bahan baku daur ulang, dan daya jual terbatas dari bahan daur ulang.

Pencemaran sampah plastik di dunia berdampak terhadap industri plastik. Industri ini dapat disebut sebagai faktor pemicu banyaknya sampah yang dihasilkan selama ini, tetapi reaksi negara-negara di dunia yang tidak tinggal diam melihat kondisi pencemaran ini membuat industri plastik juga terancam. Banyak negara dan kota di seluruh dunia telah mengadopsi pembatasan penggunaan kantong plastik dalam beberapa tahun terakhir. Pelarangan kantong plastik tipis di Mumbai, India oleh pemerintah pada tahun 2000 untuk mencegah sampah dari saluran air hujan yang tersumbat selama musim hujan. Larangan atau pajak sejak saat itu telah diadopsi di daerah-daerah lain termasuk Australia, Irlandia, Italia, Afrika Selatan, dan berbagai kota di Amerika Serikat. Penjualan kantong plastik tipis di Tanzania beresiko hukuman maksimal enam bulan di penjara dan denda 1,5 juta shilling (US \$ 1.170) (Worldwatch Institute, 2018).



Gambar 2.1 Sumber Sampah Plastik di Uni Eropa.

(Sumber: Institute for European Environmental Policy. 2011. Plastic Waste in the Environment-Final Report.

<https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf>. Diakses pada 10 Oktober 2018)

Kondisi pencemaran sampah plastik yang ada di Eropa juga terjadi di wilayah Asia. Asia merupakan tempat hampir 80% dari seluruh plastik dunia berasal (Faulder, 2018). Sampah-sampah tersebut berasal dari sungai-sungai di Asia yang kemudian bermuara ke lautan. Saluran air utama di kawasan ini mendukung tumbuhnya populasi besar yang tinggal di dekat lokasi sungai. Tumbuhnya populasi ini membuat mereka bergantung pada sistem pengelolaan sampah untuk menanggulangi sampah yang mereka hasilkan sehari-hari, namun demikian sistem pengelolaan tersebut tergolong buruk bahkan terkadang tidak ada. Limbah yang tidak dikumpulkan dibuang ke sungai sehingga menumpuk dan terbawa ke laut (Wood, 2018).

Asia Tenggara mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia pada saat ini, dan produksi plastik telah meningkat pesat. Tetapi konsumsi masyarakat telah melampaui kemampuan pengelolaan limbah sehingga menyebabkan pencemaran sampah plastik tidak dapat dihindarkan. Pencemaran sampah plastik di laut salah satunya disumbang oleh pencemaran sungai karena sampah yang

terbuang ke sungai sebagian besar akan bermuara ke laut. *The International Union for Conservation of Nature* (IUCN) menemukan bahwa lebih dari seperempat dari semua limbah plastik laut dunia mengalir dari hanya 10 sungai, delapan diantaranya merupakan sungai yang ada di Asia (Faulder, 2018).

Tabel 2. 1 Sepuluh Sungai Paling Tercemar di Dunia

No.	Nama Sungai	Negara
1.	Sungai Yangtze	China
2.	Sungai Ganga	India, Bangladesh
3.	Sungai Xi	China
4.	Sungai Huangpu	China
5.	Sungai Cross	Nigeria-Kamerun
6.	Sungai Brantas	Indonesia
7.	Sungai Amazon	Brazil, Peru, Kolombia, Ekuador
8.	Sungai Pasig	Filipina
9.	Sungai Irrawaddy	Myanmar
10.	Sungai Bengawan Solo	Indonesia

(Sumber: Faulder, Dominic. 2018. Asian Plastic Is Choking The World's Oceans. <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cover-Story/Asian-plastic-is-choking-the-world-s-oceans>. Diakses pada 19 Desember 2018)

2.1.2 Dampak dan Resiko Akibat Pencemaran Sampah Plastik di Laut

Sampah plastik di wilayah laut yang berjumlah sangat besar saat ini dipengaruhi oleh penggunaan barang-barang dalam kehidupan sehari-hari seperti kantong plastik dan kemasan-kemasan produk. Hampir semua kebutuhan sehari-hari masyarakat menggunakan kemasan yang berbahan baku plastik contohnya botol air mineral, kemasan makanan, kemasan kosmetik hingga mainan anak. Tidak bisa dipungkiri barang-barang kebutuhan sehari-hari hampir seluruhnya menggunakan plastik dan masyarakat menggunakannya secara terus menerus. Hal ini merupakan salah satu faktor pemicu banyaknya sampah plastik saat ini. Sampah yang masuk ke dalam wilayah laut sebagian besar merupakan kiriman dari daratan yang dibuang di sungai dan bermuara ke laut. Saat ini lautan di seluruh dunia telah terpapar sampah plastik, hal ini dikarenakan sampah yang dibuang di

wilayah perairan seperti sungai akan bermuara ke laut. Laut di dunia yang terhubung satu sama lain membuat sampah-sampah yang terbuang di salah satu bagian laut dapat menyebar ke wilayah laut yang lain. Oleh karena itu sering sekali pantai-pantai yang dulu bersih bahkan pantai yang masih belum banyak terjamah manusia terdapat sampah plastik disana.

Pencemaran yang terdapat di darat maupun di laut merupakan permasalahan yang tidak bisa dianggap sepele karena akibat yang dihasilkan berupa kerusakan-kerusakan dan perubahan yang signifikan terhadap keadaan laut dan daratan. Sampah plastik merupakan sampah yang sulit diurai oleh tanah dan memerlukan waktu yang lama untuk dapat melebur di dalam tanah. Dampak dari pencemaran tersebut berupa pencemaran di tanah dan di wilayah perairan. Pencemaran di darat yaitu tercemarnya tanah-tanah dengan sampah plastik sehingga menyebabkan kerusakan tanah. Sedangkan dampak pencemaran pada perairan yaitu di wilayah laut terdapat banyak sekali sampah plastik yang mengambang dan yang mengendap. Sampah plastik yang terbuang di wilayah laut di dominasi oleh sampah plastik sekali pakai seperti kantong plastik dan kemasan produk. Plastik-plastik yang mengambang dilautan menjadi permasalahan karena ikan dan hewan-hewan laut menganggap plastik tersebut sebagai makanan, selain itu beberapa hewan laut juga terjebak di dalam plastik-plastik yang mengambang tersebut. Dampak lainnya yaitu plastik yang mengendap di dasar laut menyatu dengan terumbu karang dan mengganggu pertumbuhan terumbu karang, seperti diketahui bahwa terumbu karang merupakan tempat hidup sebagian besar biota laut, hal ini tentu akan sangat mengganggu keseimbangan ekosistem dilaut.

Sampah-sampah yang mengendap akan terus mengendap di dasar lautan atau akan jatuh di sela-sela terumbu karang dan alga-alga di dasar lautan, sedangkan sampah yang mengapung akan ikut terbawa arus hingga ke bagian lautan yang lainnya. Kondisi ini membuat persoalan sampah plastik di laut menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap remeh. Pada bibir pantai sering ditemui sampah berupa tutup botol, jaring ikan bekas, kantong plastik, sedotan, bahkan peralatan memancing dan pelampung yang hanyut ke pantai. Sampah-sampah ini tidak hanya mengganggu lingkungan di dalam laut saja seperti penyu

yang terikat oleh jaring bekas dan perut burung yang penuh dengan plastik akibat mengira plastik yang mengapung di lautan adalah makanannya.

Pencemaran laut ini berdampak langsung pada satwa-satwa laut dan sekitarnya. Setiap tahunnya terdapat ribuan satwa yang terbunuh akibat sampah yang tidak sengaja termakan atau menjerat tubuh mereka, diantaranya anjing laut, penyu, burung laut, dan mamalia air lainnya. Bahkan kematian hewan-hewan akibat sampah ini menyebabkan resiko kepunahan hampir 700 spesies akibat menelan plastik atau terperangkap di dalam sampah-sampah yang mengambang dilaut, diantaranya anjing laut Monk Hawaii dan penyu tempayan Pasifik (lihat Gambar 2.2 dan 2.3) (Center for Biological Diversity, 2018).



Gambar 2.2 Penyu yang terperangkap dalam jaring bekas di perairan Mediterania (Sumber: Scuba Diver Life. 2015. Fourth Element Launches OceanPositive Swimwear and Rashguard Line. <https://scubadiverlife.com/fourth-element-launches-oceanpositive-swimwear-and-rashguard-line/>. Diakses pada 7 Mei 2018)



Gambar 2.3 Bangkai burung laut yang mati akibat memakan sampah-sampah plastik di lautan

(Sumber: Scuba Diver Life. 2015. Fourth Element Launches OceanPositive Swimwear and Rashguard Line. <https://scubadiverlife.com/fourth-element-launches-oceanpositive-swimwear-and-rashguard-line/>. Diakses pada 7 Mei 2018)

Dampak yang ditimbulkan dari banyaknya sampah plastik yang terbang ke wilayah perairan yaitu merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati dalam laut. Tercemarnya wilayah laut dapat dilihat dari banyaknya berita yang mengangkat berita mengenai kerusakan ekosistem laut serta kematian biota laut yang memakan plastik. Plastik-plastik yang terbang ke laut dan mengambang membuat hewan-hewan berpikir benda tersebut adalah ubur-ubur, sehingga banyak sekali beredar gambar-gambar yang menunjukkan lumba-lumba dan kura-kura yang tersangkut plastik yang mengambang di laut (GRID-Arendal, 2018). Tidak hanya gangguan yang dialami oleh hewan-hewan laut yang kasat mata, namun perubahan yang terjadi dan dirasakan oleh hewan-hewan tak kasat mata juga perlu diperhatikan. Setidaknya terdapat 17% spesies biota laut yang terancam terdampak pencemaran plastik di laut (Gall and Thompson, 2015). Tidak hanya di wilayah perairan, sampah kantong plastik yang bercampur di tanah akan mempengaruhi tanaman dalam menyerap nutrisi dan kelembaban. Membran plastik adalah komponen utama dari pencemaran sumber non-pertanian jika sampah tersebut terbang di darat (Shao et al., 2014).

Beberapa komposisi dari puing-puing plastik membutuhkan lebih dari satu abad untuk membusuk, secara bertahap memecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dari waktu ke waktu. Samudra Pasifik adalah rumah bagi timbunan puing-puing yang diperkirakan berukuran dua kali ukuran Prancis dan beratnya setidaknya 3 juta ton. Puing-puing plastik dan sampah lainnya di dunia sering dicerna oleh satwa liar dan membunuh satu juta burung laut per tahun, menurut *United Nations Environment Program* (UNEP). Badan itu melaporkan awal bulan ini bahwa plastik, terutama kantong plastik dan botol plastik polietilena tereftalat (PET), menyumbang lebih dari 80 persen sampah laut, sumber paling umum di seluruh dunia. Laporan itu adalah penilaian pertama dari puing-puing laut di 12 wilayah laut utama dunia. Plastik juga dapat merusak perahu, alat tangkap, dan fasilitas pertanian (Australian Government, 2012).

Banyaknya sampah plastik yang terbuang ke laut membuat negara-negara di dunia turun serta untuk menanggulangi hal ini baik secara bersama-sama melalui organisasi internasional maupun menggunakan kebijakan nasionalnya sendiri. Gerakan-gerakan untuk menghentikan dan menanggulangi sampah plastik di wilayah laut banyak dilakukan oleh organisasi internasional, koalisi-koalisi tertentu maupun masyarakat global secara sukarela seperti komitmen yang dilakukan oleh negara-negara COP21⁵ yang sepakat untuk mulai konsen pada permasalahan lingkungan tidak hanya tentang perubahan iklim namun juga hal-hal yang terkait dengan pencemaran sampah plastik di laut. Negara-negara anggota COP21 menyadari bahwa laut mengalami perubahan tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim namun juga polusi di dalamnya yang mengancam keanekaragaman hayati wilayah perairan (Segolene Royal, 2016).

Polusi sampah plastik di dunia khususnya di laut turut andil dalam perubahan iklim dunia. Polusi ini rata-rata dihasilkan oleh penggunaan plastik

⁵COP21 (*Conference of Parties*) yaitu ‘parties’ disini berarti negara-negara yang meratifikasi Konferensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (*UN Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)) pada tahun 1992 pada *Earth Summit* di Rio Janeiro. Disebut COP21 karena sejak penandatanganan UNFCCC pada tahun 1992 hingga saat ini konferensi ini telah dilaksanakan sebanyak 21 kali sehingga saat ini bernama COP21. (World Association of Girl Guides and Girls Scouts, 2018, *About COP21*, diakses melalui <https://www.waggs.org/en/what-we-do/speak-out/cop21-United-nations-conference-climate-change/> pada tanggal 10 Juli 2018)

sekali pakai yang terbuang ke tanah. Produk-produk plastik sekali pakai ini dibuat dari bahan hidrokarbon⁶ yang menghasilkan gas rumah kaca dalam proses pembuatannya dan digunakan hanya sekali untuk kemudian dibuang dan mencemari ekosistem baik tanah, sungai, maupun laut. Hal tersebut menjadi simbol dari model produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan.

Kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang tidak hanya terbatas pada anggota-anggota COP21 namun juga ikut serta merangkul organisasi non-pemerintah serta masyarakat individu untuk turut andil dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Lebih dari 500 organisasi non-pemerintah yang turut serta membuat gerakan *Break Free From Plastic* dimana gerakan ini bertujuan untuk memerangi pemborosan penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu gerakan ini juga dilakukan di Perancis yang digawangi oleh Surfrider Foundation. Gerakan penanggulangan sampah plastik dalam tingkat internasional selaras dengan gerakan *Ban the Bag* yang bertujuan untuk mendesak para pengambil keputusan, pedagang dan warga untuk peka terhadap penggunaan kantong plastik sekali pakai dan diharapkan dapat mendukung program *reusable* dalam penggunaan barang-barang plastik lainnya.

2.2 Pencemaran Sampah Plastik di China

Penelitian ini pada dasarnya berfokus pada pembahasan sampah plastik di laut di China yang berkaitan dengan kebijakan China terhadap program pencemaran sampah plastik oleh PBB. Oleh sebab itu penjelasan mendetail mengenai negara China perlu ditulis dalam penelitian ini. Kondisi pencemaran sampah plastik di China yang memprihatinkan menjadi menarik untuk diteliti lebih jauh. Penobatan negara China sebagai negara peringkat satu dunia dengan jumlah sampah plastik terbesar di laut juga menjadi poin penting untuk dibahas dalam penelitian. Pada bab ini telah dijelaskan mengenai kondisi sampah yang ada

⁶Senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang terbentuk dari unsur karbon (C) dan hidrogen (H), senyawa tersebut merupakan senyawa utama yang dibutuhkan dalam produksi plastik karena hidrogen bersifat ringan dan karbon memiliki banyak keunggulan seperti sifatnya yang stabil serta mampu membentuk ikatan tunggal yang kuat dan stabil namun dalam produksinya menghasilkan gas yang dapat mencemari udara dan mempengaruhi iklim. (Universitas Negeri Yogyakarta Repository, 2018, *Hidrokarbon*, diakses melalui <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309685/pendidikan/HIDROKARBON.pdf> pada 10 Juli 2018 pukul 12.23)

di dunia secara menyeluruh, selanjutnya akan dibahas mengenai kondisi sampah plastik dan pencemaran yang terjadi di China, sebagai negara yang diambil untuk studi kasus dalam penelitian ini. Seperti negara-negara lain permasalahan sampah plastik di China juga di dominasi oleh penggunaan plastik sekali pakai seperti botol minuman, kemasan, dan kantong plastik. Setiap orang dalam sehari dapat memakai lebih dari satu jenis produk plastik sekali pakai ditambah dengan jumlah penduduk China yang begitu besar membuat persoalan sampah plastik menjadi hal yang perlu diperhatikan lebih jauh.

Republik Rakyat China (*People's Republic of China*) merupakan negara yang terletak di Asia Timur. Pada bagian selatan berbatasan langsung dengan Mongolia dan daratan Siberia, di sebelah barat berbatasan dengan Semenanjung Korea dan Jepang, di utara berbatasan dengan wilayah Asia Tenggara dan di timur berbatasan dengan wilayah Asia Tengah dan Asia Selatan (Library of Congress, 2006). Cina memiliki luas total hampir 9.596.960 kilometer persegi. Termasuk dalam jumlah ini adalah 9,326,410 kilometer persegi tanah dan 270.550 kilometer persegi danau dan sungai pedalaman. Dari timur ke barat, jaraknya sekitar 5.000 kilometer dari Heilong Jiang (Sungai Amur) ke Pegunungan Pamir di Asia Tengah; dari utara ke selatan, jaraknya kurang lebih 4.050 kilometer dari Provinsi Heilongjiang ke Provinsi Hainan di selatan dan 1.450 kilometer lebih jauh ke selatan ke Zengmu Shoal, klaim teritorial di lepas pantai utara Malaysia.

China telah menjadi negara paling padat di dunia selama berabad-abad. Sensus penduduk yang pertama pada tahun 1953, populasinya mencapai 582 juta; oleh sensus kelima pada tahun 2000, jumlah penduduk hampir dua kali lipat, mencapai 1,2 miliar. China mencapai populasi total 1,38 miliar (termasuk Hong Kong, Makau, Taiwan) pada tahun 2016, menunjukkan peningkatan 0,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah kerusuhan sosial dan kelaparan di tahun 1950-an, populasi Cina berkembang pesat selama beberapa dekade berikutnya (Statista, tanpa tahun). Populasi China saat ini adalah 1.416.168.927 pada September 2018, berdasarkan perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terbaru, dan jumlah ini setara dengan 18,54% dari seluruh populasi penduduk dunia (Worldometers, 2018). Populasi China tumbuh sebesar 0,5% rata-rata setiap

tahun. Jika terus berlanjut pada tingkat ini, populasi total negara akan mencapai 1,46 miliar pada 2028. Jika tidak ada perubahan, diperkirakan lebih banyak orang akan menghasilkan peningkatan jumlah sampah(Christou, 2018).

Keadaan demografi yang begitu padat berpengaruh terhadap ancaman pencemaran akibat limbah rumah tangga yang dihasilkan oleh setiap individu. Lebih dari satu miliar ton kantong plastik dihasilkan dalam sehari yang diproduksi oleh 60ribu produsen plastik dengan skala yang berbeda di China. Produk-produk plastik tersebut kebanyakan tidak dapat terdegradasi di lingkungan dan menyebabkan adanya *white pollution*. *White Pollution*(polusi putih) adalah sebutan bagi sampah plastik yang tidak terdegradasi lingkungan (terutama kantong plastik). Kantong plastik biasanya ditemukan di saluran air, di pantai, dan di tempat pembuangan lainnya di seluruh China. Sampah yang disebabkan oleh kantong plastik disebut sebagai "polusi putih." Parlemen China, menanggapi pada bulan Januari 2008 dengan melarang toko, supermarket, dan outlet penjualan dari menyediakan kantong plastik gratis yang tebalnya kurang dari 0,025 milimeter(Worldwatch Institute, 2018).

Data dari Biro Pos Negara China menunjukkan bahwa 31,28 miliar barang dikirim pengiriman ekspres di China pada tahun 2016, menggunakan 3,2 miliar tas pos, 6,8 miliar kantong plastik dan 330 juta gulungan pita pengepakan.Layanan pengiriman online juga menghasilkan sejumlah besar sampah plastik. Sebuah laporan China Youth Daily mengklaim bahwa sekitar 20 juta pesanan dibuat setiap hari dari tiga layanan daring utama, menghasilkan lebih dari 60 juta karton plastik(China Dialogue, 2018).

Masalah pencemaran kantong plastik telah menarik perhatian politik dan publik yang besar terutama hubungannya dengan masalah lingkungan. Kantong plastik *polyethylene* biasanya stabil dan tahan terhadap degradasi.Bahkan meskipun *polyethylene* secara alami akan fragmen dan bio-degradasi, namun proses ini diperkirakan memakan waktu hingga seribu tahun lamanya. Persoalan lingkungan di China terkait plastik ini tidak hanya mengenai sampah plastik yang terbuang utuh di tanah maupun lautan, tetapi sebelum itu produksi plastik juga berpengaruh besar terhadap pemanasan global. Industri plastik di China

membutuhkan energi yang besar untuk memproduksi dan mendistribusikan plastik, selain itu emisi yang dihasilkan dapat berdampak pada perubahan iklim. Puing-puing plastik dan sampah lainnya di dunia sering dicerna oleh satwa liar dan membunuh satu juta burung laut per tahun, menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP). Badan tersebut melaporkan bahwa plastik terutama kantong plastik dan botol plastik *polietilena tereftalat* (PET), menyumbang lebih dari 80 persen sampah laut di dunia (Worldwatch Institute, 2018).

Banyaknya sampah plastik di China termasuk akibat dari aktivitas impor sampah dari negara-negara Eropa ke China. Sejak tahun 1992, China telah menerima sekitar 106 juta metrik ton sampah plastik, yang menyumbang hampir setengah dari impor limbah plastik dunia. China dan Hong Kong telah mengimpor lebih dari 72 persen dari semua sampah plastik, tetapi sebagian besar limbah yang masuk ke Hong Kong sekitar 63 persen diekspor ke China (Science Advances, 2018). Negara-negara berpenghasilan tinggi mengekspor sampah-sampah plastik ke China untuk di daur ulang, hal ini menguntungkan kedua pihak karena negara-negara eksportir terhindar dari persoalan sampah yang menumpuk dan China mendapatkan keuntungan dari menggunakan maupun jual-beli hasil daur ulang sampah tersebut. Namun beberapa waktu terakhir China mendapatkan kiriman sampah-sampah berkualitas buruk sehingga sedikit sekali keuntungan yang di dapat, sedangkan keadaan lingkungan domestik China yang juga semakin banyak memproduksi sampah sehingga menimbulkan persoalan sampah yang serius di China.

Pada dasarnya daur ulang sampah plastik merupakan tantangan tersendiri, berkat berbagai aditif dan campuran yang digunakan untuk memproduksi dan hanya sembilan persen dari plastik yang diproduksi secara global yang didaur ulang. Sisanya berakhir di *landfill*, insinerator, atau mengambang bebas dan mencemari lingkungan. Hal ini mungkin menguntungkan negara China sebagai pengimpor sampah dalam beberapa persen, namun selebihnya sisa yang terbuang akan menjadi persoalan baru di lingkungannya. Pemantauan pantai di 12 kota pesisir Cina, termasuk Shanghai dan Shenzhen menemukan bahwa empat dari

lima jenis sampah yang paling umum adalah plastik dan kantong plastik adalah yang paling banyak ditemukan.

Pusat Pemantauan Lingkungan Laut Nasional China mengumpulkan data pertama tentang kepadatan mikroplastik di perairan pesisir China pada tahun 2016. Ditemukan satu bagian mikroplastik di setiap 3,5 meter kubik air laut di Laut Bohai, Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan (China Dialogue, 2018). Dampak lingkungan dan kesehatan dari bisnis daur ulang plastik yang tidak diatur di Cina sangat besar seperti proses pembersihan yang mencemari saluran air, dampak yang diakibatkan dari melelehkan dan membakar sisa-sisa pelepasan menyebabkan polusi beracun ke udara, dan sisa potongan yang tidak layak untuk didaur ulang langsung dibuang ke dasar sungai (Li Jing, 2015).

Dampak pencemaran plastik di China yaitu menumpuknya sampah-sampah di tempat pembuangan akhir, hal ini berdampak besar terhadap masyarakat sekitar. Selain itu kondisi sungai yang penuh sampah juga berdampak besar terhadap perairan di China. Beberapa sungai di China dan negara lain ikut menyumbang besarnya sampah plastik yang terbuang di laut, diantaranya sekitar 90% dari semua plastik yang mencapai lautan di dunia berasal dari 10 sungai yaitu Yangtze, Indus, Sungai Kuning, Sungai Hai, Sungai Nil, Sungai Gangga, Sungai Mutiara, Sungai Amur, Niger, dan Mekong (Christou, 2018).

Sungai Yangtze di China merupakan sungai terpanjang di dunia menyumbang hampir setengah dari jumlah keseluruhan sampah yang berasal dari sungai. Dimulai di Gunung Tanggula di dataran tinggi Qinghai-Tibet, Yangtze kemudian mengalir melalui total 19 provinsi dalam perjalanan ke Laut Cina Timur. Wilayah Yangtze meliputi hampir 450 juta akre tanah dan merupakan rumah bagi lebih dari 400 juta orang, sekitar sepertiga dari populasi Cina. Sungai Yangtze mengalir melalui beberapa daerah perkotaan yang paling padat penduduknya, termasuk Shanghai (22 juta), Wuhan (9,8 juta) dan Chongqing (7,5 juta) sehingga membuat sungai ini membawa banyak sekali sampah yang dibuang masyarakat yang kemudian dialirkan ke laut (Christou, 2018). Dari 2,75 juta metrik ton sampah plastik yang masuk ke lautan oleh sungai setiap tahun, sekitar 1,5 juta atau 55% mengalir keluar dari Yangtze. Angka ini menurut sebuah

penelitian yang dipimpin oleh Christian Schmidt, seorang ahli hidrogeologi di Pusat Penelitian Lingkungan Helmholtz, yang diterbitkan dalam jurnal *Environmental Science & Technology*. Studi ini melihat data pada 79 lokasi pengambilan sampel pada 57 sungai(Christou, 2018).

BAB 3

RESOLUSI PBB UNEP/EA.3/RES.7 TENTANG PERCEMARAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT

UN (*United Nations*) atau Persatuan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional yang memiliki andil dalam permasalahan lingkungan terkait sampah plastik di laut dunia. PBB membentuk *UN Environmental Assembly* sebagai majelis yang berfokus pada persoalan lingkungan hidup dunia. Pada bab ini dijelaskan mengenai *UN Environmental Programme*, *UN Environmental Assembly*, serta kesepakatan yang dihasilkan untuk menangani persoalan lingkungan hidup di dunia khususnya persoalan pencemaran sampah plastik di laut.

Bab ini lebih berfokus terhadap pembahasan badan lingkungan PBB dan Resolusi PBB terkait sampah plastik, setelah pada bab sebelumnya dijelaskan gambaran sampah plastik dunia dan gambaran pencemaran yang terjadi di China sebagai studi kasus penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini dimulai dari penjelasan mengenai *UN Environmental Programme* dilanjutkan dengan pembahasan tentang *UN Environmental Assembly* sebagai majelis yang melahirkan resolusi PBB terkait sampah plastik di laut. Sejarah serta peran badan lingkungan hidup tersebut dalam menangani persoalan lingkungan di dunia juga dibahas dalam bab ini. Pembahasan selanjutnya mengerucut pada penjelasan mengenai kesepakatan yang dihasilkan yaitu resolusi UNEP / EA.3 /RES. 7 tentang pencemaran sampah plastik di laut dan sikap China dalam UNEA terkait resolusi tersebut.

3.1 UN Environmental Programme (UNEP)

UN Environmental Programme (UNEP) atau Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah otoritas lingkungan global terkemuka yang menetapkan agenda lingkungan global, mempromosikan penerapan yang koheren dari dimensi lingkungan pembangunan berkelanjutan dalam sistem Perserikatan

Bangsa-Bangsa, dan berfungsi sebagai pendukung otoritatif untuk lingkungan global (United Nations Foundation, 2016). Misi dari UNEP adalah memberikan kepemimpinan dan mendorong kemitraan dalam merawat lingkungan dengan menginspirasi, memberi informasi, dan memungkinkan bangsa dan bangsa untuk meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa mengorbankan generasi mendatang. UNEP sebagai katalisator, advokat, pendidik serta fasilitator untuk mempromosikan hal-hal yang berkaitan dengan program pembangunan dan pengembangan lingkungan global. Salah satu program dari UNEP yaitu *Sustainable Development Goals* yaitu program pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk pembangunan dan perbaikan kerusakan lingkungan global. UNEP sebagai fasilitator menggandeng pemerintah dari negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam program-program lingkungan PBB.

UN Environment memiliki tugas yang mencakup penelitian mendalam terhadap kondisi dan tren lingkungan global, regional serta nasional, penelitian ini digunakan dalam proses untuk mengembangkan instrumen lingkungan pada tingkat nasional dan internasional. Realisasi dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan UNEP yaitu pengelolaan yang dilaksanakan oleh aktor institusi dimana UNEP juga bertugas untuk memperkuat institusi-institusi yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan global (Kostova, tanpa tahun). Secara rinci tugas dari UNEP adalah menilai kondisi dan tren lingkungan global, regional dan nasional, mengembangkan instrumen lingkungan internasional dan nasional, memperkuat institusi untuk pengelolaan lingkungan yang baik, memfasilitasi transfer pengetahuan dan teknologi untuk pembangunan berkelanjutan, mendorong kemitraan dan pola pikir baru dalam masyarakat sipil dan sektor swasta (Australian Government, 2012).

Terdapat tujuh bidang tematik di dalam UNEP yaitu perubahan iklim, bencana dan konflik, pengelolaan ekosistem, tata kelola lingkungan, bahan kimia dan limbah, efisiensi sumber daya, dan lingkungan yang sedang ditinjau. UNEP menjadi badan penyelenggara dalam beberapa perjanjian multilateral terkait persoalan lingkungan hidup diantaranya *The Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati), *The Convention on International*

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah),*The Minamata Convention on Mercury*(Konvensi Minamata tentang Merkuri),*The Basel, Rotterdam and Stockholm Conventions*(Konvensi Basel, Rotterdam dan Stockholm),*The Vienna Convention for the Protection of Ozone Layer and the Montreal Protocol*(Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon dan Protokol Montreal), *The Convention on Migratory Species*(Konvensi tentang Spesies yang Bermigrasi),*The Carpathian Convention*(Konvensi Carpathian),*The Bamako Convention*(Konvensi Bamako), dan *The Tehran Convention*(Konvensi Tehran)(UN Environment, 2018).

UNEP memiliki kerangka keberlanjutan dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan praktik bisnis UNEP dengan mengintegrasikan langkah-langkah keberlanjutan standar dan terstruktur di seluruh pekerjaannya. Kerangka ini menetapkan standar perlindungan minimum untuk UNEP dan mitra pelaksana / pelaksana dan memungkinkan UNEP untuk mengantisipasi dan mengelola masalah lingkungan, sosial dan ekonomi terkait secara holistik. Dalam laman resmi UNEP (2016) dijelaskan bahwa kerangka bidang lingkungan, sosial dan ekonomi ini memiliki lima tujuan, yaitu:

1. Mempersiapkan pelaksanaan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dari Agenda 2030 PBB melalui keterlibatan yang lebih erat dengan entitas PBB dan mitra untuk memperkuat bantuan pembangunan dengan secara rutin mengintegrasikan dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi yang terkait dengan kegiatannya.
2. Menetapkan standar perlindungan untuk operasi yang mengkonfirmasi akuntabilitas Lingkungan PBB kepada negara-negara anggota, dan penyandang dana.
3. Memungkinkan Lingkungan PBB untuk meminimalkan potensi risiko dan bahaya sementara meningkatkan kemampuan dan kredibilitas Lingkungan PBB dengan kemitraan yang diperkuat.

4. Memungkinkan Lingkungan PBB untuk mengidentifikasi biaya siklus hidup penuh dari pilihan operasionalnya dan untuk beroperasi secara lebih berkelanjutan sambil meningkatkan efisiensi dari waktu ke waktu.
5. Memungkinkan Lingkungan PBB untuk merespon lebih cepat dan efektif terhadap isu lingkungan, sosial dan ekonomi yang muncul sebagai mitra pelaksana / pelaksana yang menarik dan terpercaya.

Dalam mencapai kelima tujuan tersebut kerangka ini menggunakan dua prinsip yang menyeluruh yaitu pendekatan kehati-hatian dan pendekatan berbasis hak asasi manusia . Prinsip-prinsip tersebut juga termasuk di dalam sembilan poin *Safeguard Standard* yaitu: 1) Konservasi keanekaragaman hayati, habitat alami, dan pengelolaan sumber daya kehidupan yang berkelanjutan (*Biodiversity conservation, natural habitats, and sustainable management of living resources Resource efficiency*); 2) Efisiensi sumber daya, pencegahan polusi dan pengelolaan bahan kimia dan limbah (*pollution prevention and management of chemicals and wastes*); 3) Keamanan bendungan (*Safety of dams*); 4) Perpindahan tidak dengan sukarela (*Involuntary resettlement*); 5) Masyarakat adat (*Indigenous peoples*); 6) Tenaga kerja dan kondisi dalam pekerjaan (*Labor and working conditions*); 7) Perlindungan warisan budaya yang nyata (*Protection of tangible cultural heritage*); 8) Kesetaraan gender (*Gender equality*); 9) Keberlanjutan ekonomi (*Economic sustainability*)(UN Foundation, 2016). Standar *Safeguard* ini memiliki komitmen yang sejalan dalam mendampingi tujuan UNEP untuk mempromosikan tentang lingkungan, sosial dan ekonomi dunia yang berkelanjutan.

UNEP menjadi tuan rumah beberapa konvensi lingkungan, sekretariat dan badan koordinasi antar-lembaga termasuk *United Nations Environmental Assembly* (Majelis Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa). Majelis ini dibentuk dengan kepentingan dimana dunia harus mulai lebih memperhatikan persoalan lingkungan hidup secara masif dan berkelanjutan. Menurut Achim Steiner, direktur eksekutif UNEP dalam laman resmi United Nations Foundation menyatakan bahwa persoalan lingkungan saat ini telah bergeser dari sesuatu

yangmargin perhatian menuju pusat pertimbangan dalam pengambilan keputusan global(UN Foundation, 2016).

UNEP membentuk agenda dalam UNEA (2016) dengan mengatur diskusi-diskusi diantara para peserta yang terdiri dari golongan-golongan tertentu seperti:

- Forum Sains:

Forum ini menawarkan delegasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, ilmuwan, dan peserta sektor swasta sebuah jendela ke informasi ilmiah yang paling relevan tentang tantangan lingkungan utama. Dalam hubungannya dengan forum, UNEP merilis laporan regional pertama kalinya untuk penilaian tandatangan, *The Global Environment Outlook*, yang akan diselesaikan pada tahun 2018.

- *Global Major Groups dan Stakeholder Forum (GMGSF)*:

Dalam mengadopsi Platform Aksi PBB pada KTT Bumi Rio pada tahun 1992, PBB menyetujui partisipasi sembilan kelompok masyarakat sipil utama - wanita, anak-anak dan remaja, masyarakat adat, organisasi non-pemerintah, otoritas lokal, kerja dan serikat dagang, bisnis dan industri, komunitas sains dan teknologi, dan petani. Kelompok-kelompok ini sekarang berpartisipasi sebagai pengamat dalam diskusi ekonomi, lingkungan, dan sosial PBB sebagai koalisi (GMGSF). UNEP telah lama berkomitmen untuk menawarkan forum ini suara dalam musyawarahnya.

- Eksposisi Inovasi Berkelanjutan:

Eksposisi ini memamerkan teknologi lingkungan hidup dari energi terbarukan ke sistem pemurnian air hingga pendekatan pengelolaan data baru.

- *Assembly*

Delegasi pemerintah menghadiri Majelis Lingkungan PBB untuk meninjau kemajuan dua tahun, mengadopsi resolusi pada program masa depan, dan untuk menyoroti isu-isu lingkungan yang membutuhkan tindakan pemerintah yang mendesak.

3.2 UN Environmental Assembly (UNEA)

UN Environmental Assembly (UNEA) atau Majelis Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan bagian dari UNEP adalah badan pembuat keputusan tingkat tertinggi dunia tentang lingkungan dengan pembahasan tentang tantangan lingkungan kritis yang dihadapi dunia saat ini. Pembuatan kebijakan lingkungan dan pengembangan hukum lingkungan internasional dilaksanakan melalui pertemuan yang dilaksanakan dalam kurun waktu dua tahun sekali. Persoalan lingkungan pada dasarnya merupakan persoalan semua manusia di bumi ini, sehingga dalam proses pengambilan keputusan diperlukan partisipasi dari semua pihak secara luas untuk membantu merancang solusi yang paling baik bagi kelangsungan hidup di bumi ini (UNEA, tanpa tahun).

UNEP dan UNEA sebagai badan penyelenggara program-program lingkungan dalam skala internasional memiliki sejarah perjalanan yang panjang dalam proses berdirinya. Isu lingkungan yang merupakan isu penting dunia membutuhkan adanya platform atau wadah untuk kerja sama yang terfokus dalam kegiatan lingkungan. Dasar ini yang membuat badan lingkungan ini terbentuk.

3.2.1 Sejarah Terbentuknya UN Environmental Assembly

UN Environmental Assembly (UNEA) dibentuk pada bulan Juni 2012 ketika para pemimpin dunia menyerukan untuk memperkuat serta meningkatkan program lingkungan selama Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang juga disebut sebagai RIO + 20. *UN Environment Assembly* (UNEA) mewujudkan era baru di mana lingkungan berada dalam pusat fokus komunitas internasional dan diberi tingkat yang sama pentingnya sebagai isu-isu penting dunia seperti perdamaian, kemiskinan, kesehatan dan keamanan. Pembentukan UN Environmental Assembly merupakan puncak dari upaya internasional, yang dimulai pada Konferensi PBB mengenai *human environment* di Stockholm pada tahun 1972. Konferensi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem koheren dari tata kelola lingkungan internasional (UNEA, tanpa tahun).

UNEA adalah mekanisme tata kelola yang diusulkan pada KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (Rio + 20) pada tahun 2012 dan disetujui

oleh Majelis Umum PBB di akhir tahun itu. Konferensi Rio + 20 juga mengadopsi “*The Future We Want*” (Masa Depan yang Kita Inginkan) menyerukan agenda pembangunan PBB yang baru dan negosiasi "Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" yang diadopsi di Sidang Umum PBB pada September 2015. Majelis Lingkungan PBB adalah badan universal pertama untuk lingkungan di PBB, memberikan setiap negara suara dan suara.

KTT Rio + 20 pada tahun 2012 menunjukkan bahwa negara-negara anggota PBB, terutama negara-negara berkembang, menginginkan komitmen luas untuk pembangunan berkelanjutan dan mengakui bahwa sistem lingkungan alam (atmosfer, tanah, air tawar, dan lautan) terus memburuk dan upaya yang lebih terpadu diperlukan. Menciptakan Majelis Lingkungan PBB membawa 194 menteri lingkungan ke dalam forum untuk meninjau penilaian, mendiskusikan tindakan, dan membuat rekomendasi kepada pemerintah tentang tindakan yang harus dilakukan secara nasional, regional, dan global setiap dua tahun.

Komite Perwakilan Tetap (*The Committee of Permanent Representatives*) adalah badan antarpemerintah, komite ini dipimpin oleh Perwakilan Tetap (*Permanent Representatives*) terakreditasi untuk *UN Environmental Programme*, yang bertanggung jawab terhadap 118 anggotanya. Komite Perwakilan Tetap secara resmi dibentuk sebagai organ anak perusahaan dari Dewan Pengatur (*Governing Council*), sekarang *UN Environmental Assembly*, pada bulan Mei 1985. Komite bertemu secara triwulanan yang dipimpin oleh biro lima anggota yang dipilih untuk jangka waktu dua tahun. Sepanjang tahun, negara-negara anggota terlibat dalam diskusi persiapan resmi di bawah kerangka pertemuan Komite Tetap yang Terbuka. Komite memberikan kontribusi untuk persiapan agenda *UN Environmental Assembly*, dan memberikan saran kepada Majelis mengenai hal-hal kebijakan, menyiapkan keputusan untuk diadopsi oleh *UN Environmental Assembly* dan mengawasi pelaksanaannya (UNEA, tanpa tahun).

UNEA adalah badan pelaksana Program Lingkungan Hidup PBB (*UN Environment Programme*) dan penerus Dewan Pemerintahannya, yang terdiri dari 58 negara anggota. *UN Environmental Assembly*, dengan keanggotaan universal,

sekarang terdiri dari 193 negara anggota (UNEA, tanpa tahun). UNEP memiliki perjalanan yang panjang dalam pengembangan dan implementasi hukum lingkungan dunia. Sebagai platform antar pemerintah untuk mengembangkan dan merealisasikan perjanjian lingkungan multilateral, prinsip-prinsip serta pedoman ditujukan untuk mengatasi tantangan lingkungan global (Kostova, tanpa tahun). Program-program dan perjanjian multilateral terkait isu lingkungan tidak serta merta terbentuk dan dirumuskan begitu saja, namun melalui beberapa sesi mengingat isu-isu lingkungan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Sesi pertama dan kedua dari UN Environmental Assembly menangani dan mengadopsi resolusi pada isu-isu utama tentang perdagangan ilegal satwa liar, kualitas udara, aturan hukum lingkungan, pembiayaan Ekonomi Hijau, *Sustainable Development Goals*, dan agenda pencapaian *Sustainable Development* pada tahun 2030 mendatang (UNEA, tanpa tahun).

3.2.2 Peran UN Environment Assembly

UN Environmental Assembly juga merancang program mengenai hukum-hukum terkait isu lingkungan salah satunya pada Program Montevideo ke-4 untuk Pengembangan dan Tinjauan Berkala Hukum Lingkungan (*The 4th Montevideo Programme for the Development and Periodic Review of Environmental Law*), yang diadopsi oleh Negara-negara Anggota pada tahun 2009 membentuk strategi yang luas untuk komunitas hukum internasional dan UNEP dalam merumuskan kegiatan di bidang hukum lingkungan selama satu dekade hingga 2020.

Pada Kongres Dunia UNEP ke-1 tentang Keadilan, Pemerintahan dan Hukum untuk Pelestarian Lingkungan (*The 1st UNEP World Congress on Justice, Governance and Law for Environmental Sustainability*) yang diadakan pada tahun 2012, negara-negara anggota menyerukan UNEP untuk memimpin Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations System*) dan mendukung pemerintah nasional dalam pengembangan dan implementasi aturan hukum lingkungan (UNEP / GC.27 / 9) (Kostova, tanpa tahun). Melalui Divisi Hukum dan Konvensi Lingkungan, UNEP terlibat dalam acara dan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan aturan hukum lingkungan, termasuk pengembangan hukum lingkungan yang progresif, melindungi hak asasi manusia

dan lingkungan, menangani kejahatan lingkungan, meningkatkan akses terhadap keadilan di masalah lingkungan, dan pengembangan kapasitas umum untuk pemangku kepentingan yang relevan.

3.3 Resolusi UN Tentang Pencemaran Sampah Plastik di Laut

Keprihatinan terhadap keadaan dunia yang mengalami krisis sampah plastik yang semakin parah menjadi dasar terbentuknya platform dalam PBB untuk berkonsentrasi terhadap persoalan lingkungan. Platform ini tidak bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi yang diangkat apabila tidak ada produk hukum atau aturan yang jelas bagi anggota. Oleh karena itu dirumuskan aturan tersebut dalam bentuk resolusi (*Resolutions*) maupun keputusan (*Decisions*). Resolusi (*Resolutions*) adalah ekspresi formal dari pendapat atau kehendak organ PBB sedangkan keputusan (*Decisions*) adalah jenis tindakan formal lain yang diambil oleh badan-badan PBB. Keduanya sering memperhatikan hal-hal prosedural seperti pemilihan, janji, waktu dan tempat sesi di masa depan. Terkadang juga digunakan untuk merekam pengadopsian teks yang mewakili konsensus anggota organ yang diberikan. Keduanya merupakan produk hukum dalam PBB dan memiliki status hukum yang sama. Resolusi Majelis Umum (General Assembly) mencerminkan pandangan dari Negara-negara Anggota, memberikan rekomendasi kebijakan, memberikan mandat kepada Sekretariat PBB dan badan-badan pendukung Majelis Umum (General Assembly). Pelaksanaan rekomendasi kebijakan yang terkandung dalam resolusi/keputusan adalah tanggung jawab masing-masing negara anggota (UN, 2017).

Pengambilan keputusan dan pembuatan aturan dalam PBB melalui banyak tahap sebelum menjadi dokumen yang siap rilis, yaitu proses *pra-session*, *in-session*, *post-session*, dan pembentukan dokumen lainnya. Pada *pra-session* dokumen disajikan kepada peserta sebelum sesi untuk membantu mereka mempersiapkan pertimbangan setiap item agenda. Dokumen pra-sesi terdiri dari dokumen kerja resmi (UNEP / EA.4 / x) dan dokumen-dokumen Informasi (UNEP / EA.4 / INF / x). Beberapa dokumen dilambangkan dengan ... / Add.x atau ... / Rev.x simbol. Dalam *in-session* dokumen disajikan dan dipertimbangkan selama Majelis berlangsung. Karena sifat dokumen yang sementara dan kadang-

kadang sensitif secara politis, sebagian besar hanya tersedia bagi para delegasi yang berpartisipasi pada "Platform Resolusi", yang dilindungi dengan kata sandi. Dokumen *in-session* terdiri dari dokumen terbatas (UNEP / EA.4 / L.x), makalah ruang konferensi (UNEP / EA.4 / CRP.x) dan *non-paper*. Sedangkan dalam *post-session* dokumen pasca-sesi adalah dokumen akhir yang dikeluarkan setelah akhir sesi. Hal ini termasuk proses pertemuan serta resolusi dan keputusan yang telah diadopsi. Dalam setiap sesi juga akan dilampirkan dokumen resmi lainnya termasuk Dokumen Hasil Menteri, Laporan Direktur Eksekutif, pernyataan, catatan panduan, dan lain-lain (UNEA, 2018).

Dokumen kerja resmi (UNEP / EA.3 / x) disiapkan oleh Sekretariat sesuai dengan resolusi Majelis sebelumnya untuk dipertimbangkan di bawah setiap item agenda. Sekretariat menyiapkan dokumen-dokumen dari Majelis Lingkungan PBB sesuai dengan Aturan 30 dari Aturan Prosedur (*Rule 30 of the Rules of Procedure*). Sekretariat juga menyiapkan dan menyajikan rancangan resolusi yang diajukan oleh negara-negara anggota sesuai dengan Aturan 44 dari Aturan Prosedur (*Rule 44 of the Rules of Procedure*) (UNEA, 2018). Perilisan dokumen berupa resolusi melalui banyak tahap, begitu pula dengan format dokumen yang dirilis. Terdapat empat sesi pertemuan dalam UNEA yang menghasilkan kesepakatan yang berbeda-beda.

a. *UN Environmental Assembly* Sesi Pertama (UNEA-1)

Sesi pertama pertemuan UNEA memiliki harapan agar semua dimensi dari pembangunan berkelanjutan dan pembangunan sosial ekonomi untuk selaras dengan alam. Pada sesi inilah awal mula terbentuknya *Millenium Development Goals* yaitu tujuan pembangunan untuk kehidupan bumi yang lebih baik dimana terdapat lima sub-tema pembangunan. Kelima sub-tema tersebut diantaranya Polusi Air (*Water Pollution*), Polusi Tanah (*Land Pollution*), Polusi Laut (*Marine Pollution*), Pencemaran Udara (*Air Pollution*), dan Pengelolaan Bahan Kimia dan Limbah (*Sound Management of Chemicals and Waste*) (UNEA, 2014).

Pada sesi pertama dalam pembentukan UNEA dan UNEP telah disinggung mengenai persoalan pencemaran dalam kelima sub-tema yaitu Polusi Air (*Water*

Pollution), Polusi Tanah (*Land Pollution*), Polusi Laut (*Marine Pollution*), Pencemaran Udara (*Air Pollution*), dan Pengelolaan Bahan Kimia dan Limbah yang Baik (*Sound Management of Chemicals and Waste*). Dalam sesi ini hanya secara garis besar membahas polusi menurut bagian-bagiannya saja. Pada sesi pertama seluruh negara-negara anggota sepakat dalam keputusan majelis mengenai arah pembentukan program pembangunan berkelanjutan, persoalan perdagangan satwa liar serta kelestarian hutan (UNEA, 2014).

b. *UN Environmental Assembly* sesi kedua (UNEA-2)

Pertemuan UNEA sesi kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2016 hingga tanggal 27 Mei 2016 di Nairobi, Kenya. UNEA yang mewakili badan pengambilan keputusan tertinggi dunia tentang lingkungan akan menyerukan pada dunia untuk bertindak lebih aktif dalam mengatasi tantangan isu lingkungan yang dihadapi dunia pada saat ini dan mendatang (UNEA, 2016). Sesi kedua UNEA mengusung tema “*Delivering on the 2030 Agenda*” secara garis besar membahas tentang mewujudkan dimensi lingkungan dari Agenda 2030 untuk Sustainable Development Goals (Anderson, 2016). Pada sesi kedua ini UNEA lebih fokus pada penyatuan anggota PBB yang terdiri dari aktor kepala negara atau pemerintah, pemangku kepentingan, masyarakat sipil, menteri, aktor-aktor dalam perjanjian internasional serta sektor swasta. UNEA meyakini bahwa adanya bekerja sama dari semua pihak dapat meningkatkan pembangunan lingkungan yang lebih sehat untuk mendukung umat manusia untuk generasi yang akan datang (UNEA, 2016).

Persoalan pencemaran sampah ini dibahas secara lebih spesifik dalam sesi kedua UNEA yang merumuskan resolusi dan program Sustainable Development Goals dengan 17 tujuannya yaitu diantaranya Pengentasan Kemiskinan (*No Poverty*), Pengentasan Kelaparan (*Zero Hunger*), Kehidupan Yang Sehat Dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*), Pendidikan Yang Berkualitas, Kesetaraan Gender (*Quality Education, Gender Equality*), Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*), Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*),

Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*), Industri Inovasi dan Infrastruktur (*Industri, Innovation and Infrastructure*), Pengurangan Kesenjangan (*Reduced in Equality*), Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*), Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggungjawab (*Responsible Consumption and Production*), Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*), Ekosistem Laut (*Life Below Water*), Ekosistem Darat (*Life on Land*), Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh (*Peace, Justice and Strong Institutions*), Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*) (Anderson, 2016).

Dalam UNEA-2 ini dihasilkan resolusi mengenai sampah plastik di wilayah laut yaitu UNEP / EA.2 / RES. 11. Dalam resolusi 2/11 tentang sampah plastik dan mikro plastik, *UN Environment Assembly* meminta Direktur Eksekutif *UN Environment Assembly* untuk membantu negara-negara anggota, terutama negara-negara berkembang, dengan penekanan pada negara-negara berkembang yang berupa pulau kecil dan negara-negara terbelakang. Permintaan mereka dalam resolusi ini yaitu adanya pengembangan dan pelaksanaan tindakan dan rencana aksi nasional atau regional; dan untuk melakukan penilaian terhadap keefektifan strategi dan pendekatan tata kelola internasional, regional dan subregional yang relevan untuk memerangi sampah plastik dan mikro laut. Program ini diharapkan mempertimbangkan kerangka kerja peraturan yang relevan dan mengidentifikasi kemungkinan adanya celah dan opsi untuk mengatasi persoalan sampah tersebut, termasuk melalui kerja sama dan koordinasi regional , serta untuk menyajikan evaluasi kepada *UN Environment Assembly* pada sesi berikutnya.

Dalam pertemuan ini China mengeluarkan pernyataan kesimpulan mengenai hasil pertemuan yang akan diadopsi oleh China. Hasil pertemuan yang diadopsi China yaitu secara garis besar mendukung pelaksanaan SDGs. Beberapa hal yang disoroti China dalam pertemuan ini diantaranya pemberantasan kemiskinan, promosi mengenai program pembangunan

SDGs, serta perjuangan lingkungan dan polusi. Dalam poin resolusi mengenai sampah plastik di laut (UNEP/EA.2/RES.11) China tidak menyatakan penolakan tetapi juga tidak menyatakan konsentrasinya terhadap poin ini (UNEA, 2018).

c. *UN Environmental Assembly* sesi ketiga(UNEA-3)

Sesi ketiga dari UNEA dilaksanakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 4-6 Desember 2017 dengan tema utama yaitu “*Towards a Pollution-Free Planet*” (Mwangi, 2017). Pada tahun ini juga UNEA membentuk dialog interaktif pemimpin-pemimpin dunia yang berisi diskusi serius mengenai bagaimana cara untuk mencapai tujuan berupa keadaan dunia yang tanpa polusi. Dalam UNEA-3 ini terdapat 11 resolusi yang diadopsi oleh negara-negara anggota, antara lain: memerangi penyebaran sampah plastik laut dan plastik mikro; menghilangkan paparan cat timbal dan mempromosikan manajemen limbah berbahaya yang baik; meningkatkan kualitas udara secara global; mengatasi polusi air; mengelola polusi tanah; dan mengendalikan polusi di wilayah yang terkena dampak operasi teroris dan konflik bersenjata. Salah satu resolusi yang diadopsi mengenai pencemaran laut dan sampah plastik adalah resolusi UNEP / EA.3 / RES. 7, sebelumnya pada UNEA-2 kesepakatan mengenai program pencegahan pencemaran laut juga telah diadopsi yaitu resolusi UNEP / EA.2 / RES. 11. Kesepakatan tersebut diperbarui dalam UNEA-3 karena penyesuaian terhadap isu dan persoalan sampah plastik yang semakin berkembang (UN, 2018).

Resolusi ini diadopsi selama sesi ketiga dari UN Environmental Assembly (UNEA-3), menambah konsensus global yang tumbuh cepat bahwa untuk mengakhiri polusi plastik laut kita harus berinvestasi dalam peningkatan pengelolaan limbah padat kota, dengan fokus pada negara berkembang yang memiliki populasi besar pada daerah dekat sungai dan garis pantai.

Menurut Abdulrahman A-Fageeh sebagai ketua *World Plastic Council*, resolusi ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang disponsori oleh *Ocean Conservancy's Trash Free Seas Alliance*⁷ dalam *Stemming the Tide: Strategi Berbasis Darat Untuk Laut Bebas Plastik (Stemming the Tide: Land-based Strategies for a Plastic-Free Ocean)*(American Chemical Council, 2017). Sebelum terbentuknya resolusi UNEP/EA.3/RES.7 terdapat draft resolusi yaitu UNEP / EA. 3 / L.20. Draft tersebut berisi saran dan masukan kepada negara anggota yang lebih terperinci. Hasil dari pembahasan draft tersebut disepakati dan dituangkan dalam UNEP / EA.3 / RES. 7. Dokumen tersebut berisikan poin-poin apa saja yang menjadi fokus pembahasan dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan negara untuk mengatasi isu yang diangkat.

Keadaan dunia yang begitu dinamis dan dapat mengalami perubahan yang sangat cepat ini juga berdampak pada kondisi sampah plastik di lautan. Pada setiap tahun terjadi peningkatan volume sampah yang terbuang ke laut (Dennis, 2017). Oleh karena itu diperlukan adanya pembaruan kesepakatan oleh UN Environment Assembly sebagai badan lingkungan dunia yang berguna untuk meningkatkan kesadaran dalam penanggulangan sampah plastik demi kelangsungan hidup di dunia.

Berbeda dengan isi resolusi pada sesi sebelumnya (UNEP / EA.2 / RES. 11), pada sesi ini UNEA menghasilkan resolusi yang lebih memiliki poin-poin yang lebih matang terkait kesepakatan antar anggota tentang sampah plastik di laut. Resolusi UNEP/EA.3/RES.7 tahun 2017 merupakan resolusi yang ditolak oleh China dalam majelis dan menjadi pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini. Resolusi ini pada poin pertama diawali dengan penegasan kembali kepada program dan resolusi terkait pada sesi sebelumnya yaitu Agenda 2030 untuk

⁷*Ocean Conservancy's Trash Free Seas Alliance* merupakan aliansi dari *Ocean Conservancy* yang merupakan organisasi nirlaba yang berfokus pada persoalan lingkungan di laut dan salah satu dari beberapa organisasi yang membantu kelangsungan hidup satwa liar di laut. Aliansi ini menyatukan para pemimpin industri, sains, dan konservasi yang memiliki tujuan bersama untuk mendapatkan lautan sehat yang bebas dari sampah. Aliansi menyediakan forum konstruktif yang berfokus pada mengidentifikasi peluang untuk solusi lintas sektor yang mendorong tindakan dan mendorong inovasi. (Ocean Conservancy Official Website, Fighting For Trash Free Seas, 2018, diakses melalui <https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/plastics-in-the-ocean/trash-free-seas-alliance/> pada tanggal 4 Oktober 2018)

pembangunan berkelanjutan dan mengingat agenda SDG's yang terkait dengan pencegahan dan pengurangan polusi laut:

“Reaffirming General Assembly resolution 70/1 of 25 September 2015, by which the General Assembly adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development, and recalling Sustainable Development Goal 14 and its target 14.1, which seeks, by 2025, to “prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution” (UNEA, 2017)

Poin ini memberi penegasan kembali tentang Agenda 2030 untuk *Sustainable Development Goals* khususnya pada poin 14.1 untuk mencegah dan secara signifikan mengurangi polusi laut termasuk sampah plastik. Selain itu resolusi ini juga menyinggung resolusi sebelumnya pada poin kedua:

“Recalling its resolutions 1/6, entitled “Marine plastic debris and microplastics,” and 2/11, entitled “Marine plastic litter and microplastics,” on measures to reduce marine plastic litter and microplastics” (UNEA, 2017)

Poin-poin awal yang menegaskan dan menyinggung tentang resolusi sebelumnya berfungsi sebagai landasan isi dari resolusi yang diperbarui ini. Hal ini dibuktikan dengan 11 poin isi dari resolusi UNEP / EA. 3 /RES. 7 yang sebagian besar berisi tentang himbauan yang lebih keras daripada resolusi sebelumnya. Dalam resolusi ini lebih banyak poin yang menekankan dan mendesak negara anggota dan aktor-aktor terkait urgensi penanggulangan sampah plastik di laut. Salah satu poin dalam resolusi ini yang mendesak negara anggota untuk berperan aktif dalam program penanggulangan sampah plastik di laut yaitu pada poin ke 11.3 yang berbunyi:

“3.Encourages all member States, based on best available knowledge of sources and levels of marine litter and microplastics in the environment, to prioritize policies and measures at the appropriate scale to avoid marine litter and microplastics from entering the marine environment” (UN Environment Assembly, 2017)

Penggunaan kata mendesak (*encourages*) pada kalimat ini cukup untuk menarik kesimpulan bahwa kondisi sampah plastik yang semakin kritis sehingga badan lingkungan *UN Environmental Assembly* menegaskan kembali pada negara-

negara anggota dan aktor terkait. Dalam hal ini juga termasuk penegasan bagi para produsen/industri untuk mengurangi produksi plastik demi meminimalisir sampah plastik yang akan dihasilkan nantinya.

Secara garis besar resolusi ini memperbarui himbauan-himbauan menjadi lebih keras dibandingkan dengan himbauan pada resolusi yang dihasilkan sesi sebelumnya. Penegasan ini meliputi himbauan untuk daur ulang serta pengurangan produksi plastik oleh negara-negara anggota. Penegasan untuk mengurangi produksi plastik inilah yang dengan tegas ditolak oleh China. Sehingga dalam pertemuan UNEA-3 ini dari 11 resolusi yang diadopsi, China memilih fokus pada isu-isu tertentu saja diantaranya manajemen limbah berbahaya, program penghijauan untuk menindaklanjuti isu polusi udara, serta inisiasi *Green Belt & Road* yang bertujuan untuk *Sustainable Development Goals* (UNEA, 2018).

d. *UN Environmental Assembly* sesi keempat(UNEA-4)

Sesi keempat dari UNEA menampilkan tema baru yang lebih bersesuaian dengan keadaan dunia saat ini dan program yang telah dicanangkan sebelumnya. Sesuai dengan panduan dalam konferensi PBB tentang *Sustainable Development* (Konferensi RIO + 20),tema pada sesi ini berjudul “*The Future We Want*” yang berarti masa depan yang kita inginkan. Tema ini berarti kepala negara, pemerintah dan perwakilan tingkat tinggi mengakui bahwa pengentasan kemiskinan dari perubahan yang tidak berkelanjutan, mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta melindungi, mengelola basis sumber daya alam dari pembangunan ekonomi dan sosial adalah tujuan menyeluruh dari dan persyaratan penting untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu pada sesi keempat ini UNEA lebih berfokus pada pencapaian tujuan dari Agenda 2030 untuk *Sustainable Development* (United Nations, 2018).

Fokus tujuan dari UNEA-4 ini berdasarkan pertimbangan dari negara-negara anggota atas dasar kriteria relevansi secara global. Penentuan fokus tujuan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang konkrit dan efektif serta efisien dalam memanfaatkan waktu sepanjang sesi keempat dari *UN Environmental*

BAB 5

KESIMPULAN

Kebersihan dan kelangsungan kehidupan ekosistem laut merupakan hal penting yang harus dijaga dan dilestarikan. Keadaan lingkungan dunia terutama di laut yang semakin hari semakin kritis akibat pembuangan sampah plastik di wilayah laut. Pembentukan Resolusi PBB berawal dari keadaan laut di dunia yang semakin banyak tercemar oleh sampah plastik yang sengaja dibuang ke laut. China sebagai negara anggota PBB dan negara penghasil sampah plastik terbesar di laut memilih untuk menolak resolusi PBB UNEP/EA.3/RES.7 tentang sampah plastik di laut. China yang saat ini dalam proses industrialisasi secara besar-besaran menganggap industri plastik merupakan komoditi strategis.

Hasil dari karya ilmiah menunjukkan bahwa terdapat alasan kuat mengapa China tidak ikut serta menandatangani kesepakatan Resolusi PBB tentang sampah plastik di laut. Alasan utama yaitu pembangunan perekonomian China melalui industrialisasi, khususnya industri plastik. Industri plastik merupakan sektor yang strategis dimana permintaan yang terus meningkat akan membuat industri plastik di China terus berkembang dan mendukung penguatan perekonomian domestik. Pendapatan GDP yang didapat dari sektor industri plastik mencapai setengah dari keseluruhan kontribusi dari sektor industri.

Keputusan China untuk tidak ikut serta dalam resolusi PBB menjadi rasional karena China harus melindungi kepentingan ekonominya. Jika China sepakat dalam resolusi PBB maka China harus mengurangi produksi plastiknya. Hal ini dapat melemahkan perekonomian domestik China yaitu penurunan GDP China. Sikap yang diambil oleh China dalam perannya sebagai aktor internasional merupakan pertimbangan dari tujuan China untuk memproteksi kepentingan nasionalnya, khususnya kepentingan ekonomi dalam hal industri plastik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Demurger, S., Sachs, J. D., Woo, W. T., Bao, S. Chang, G., dan Mellinger, A. 2002. *Geography, Economic Policy, and Regional Development in China*. Massachusetts: Center for International Development and the Massachusetts Institute of Technology.
- Hara, A. E. 2011. *Analisis Politik Luar Negeri*. Bandung: Nuansa.
- Hasenclever, A. 1997. *Theories of International Regime. Three Perspectives on International Regimes*. Cambridge University.
- Law, K. L. 2017. *Plastic in the Marine Environment*. Massachusetts: Sea Educations Assosiations.
- Linklater, A., & Burchill, S. 2015. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Mas'ood, M. 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian(7th ed.)*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Roskin, M. G. 1994. *National Interest: From Abstraction to Strategy*. United States of America: Strategic Studies Institute, U.S. Army War College
- Sitepu, P. A. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. 1992. Agenda 21. *United Nations Conference on Environment & Development*. 3-4 Juni 1992. United Nations Sustainable Development: 2-4.
- . 2017. *The GA Handbook: A Practical Guide to the United Nations General Assembly*. Edisi ke-2. New York: Permanent Mission of Switzerland

Varrall, M. 2015. *China World Views and China's Foreign Policy*. Sidney: Lowy Institute for International Policy.

Yoshimatsu, H., dan Qiang, X. 2016. *China and Institution-Building for Environmental and Energy Cooperation in East Asia*. Japan: Ritsumeikan Asia Pasific University.

Buku Terbitan Lembaga/Badan/Organisasi

United Nations (UN). 2017. *The GA Handbook: A Practical Guide To The United Nations General Assembly*. Permanent Mission of Switzerland to the United Nations (2). New York: UN

Jurnal Ilmiah

Barra, R. dan Leonard S. A. 2018. Plastics and the Circular Economy. *54th Global Environment Facility Council Meeting*. 24-26 Juni 2018. *Global Environment Facility*.

Chunmei, W. dan Zhaolan L. 2010. Environmental Policies in China over the Past 10 Years: Progress, Problems and Prospects. *Procedia Environmental Science*.

Gall, S. C. dan Thompson, R. C. 2015. The Impact of Debris on Marine Life. *Marine Pollution Bulletin*. 92.

Grabowski, Richard. 2000. The State and the Pursuit of the National Economic Interest: *Canadian Journal of Development Studies*. 21(2).

-----, 2002. Constructing National Economic Interests. *Journal of the Asia Pasific Economy*. 7(5).

Gray J. M. 1997. Environment, Policy and Municipal Waste Management in the UK. *Transactions of the Institute of British Geographers*. 22(1).

Kenderdine, Tristan. 2017. China's Industrial Policy, Strategic Emerging Industries and Space Law: China's Industrial Policy. *Asia & the Pacific Policy Studies*. 4(2).

Kiyono, Ken. 1969. A Study on the Concept of The National Interest of Hans J. Morgenthau: as The Standard of American Foreign Policy. *Management and Economics*. 49(3).

Nuechterlein, D. E. (1976). National Interests and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision-Making. *British Journal of International Studies*. 3(2).

Oriz, C. H. (2009). Industrialization and Growth: Threshold Effects of

Technological Integration. *Cuadernos de Economia*. 28(51).

Rochester, J. (1978). The “National Interest” and Contemporary World Politics. *The Review of Politics*. 40(1).

Shao, Y., Cai, H., dan Chen, G. 2014. Rethinking Plastic Bag Pollution Problems in China. *Environmental Science: An Indian Journal*. 9(6).

Weissmann, M. 2015. Chinese Foreign Policy in a Global Perspective: A Responsible Reformer “Striving For Achievement”. *Journal of China and International Relation*. 3(1).

Peraturan, Undang-Undang atau sejenisnya

UN Environment Programme 2nd Forum. *Draft Resolutions of the United Nations Environment Assembly at its third session*. 6 September 2017. Bangkok: UN Environment Programme.

Artikel dan Berita Internet

American Chemical Council. 2017. The World Plastics Council Welcomes New UN Resolution on Marine Litter. <https://www.americanchemistry.com/Media/PressReleasesTranscripts/ACC-news-releases/The-WPC-Welcomes-New-UN-Resolution-on-Marine-Litter.html>. (Diakses pada 4 Oktober 2018)

Anderson, L. 2016. UNEA-2 Discusses Implementation of 2030 Agenda, Paris Agreement. <https://sdg.iisd.org/443/news/unea-2-adopts-25-resolutions/>. (Diakses pada 11 April 2019)

Armstrong, Martin. 2018. Infographic: The Countries Importing the World's Plastic Waste. <https://www.statista.com/chart/14383/countries-importing-plastic-waste/>. (Diakses pada 18 Februari 2019)

Bay Source. 2018. Plastic Manufacturers in China. <https://baysourceglobal.com/plastic-manufacturers-in-china/>. (Diakses pada 18 Desember 2018)

Beukering, P. V. 1997. Trends and Issues in the Plastics Cycle in China with Emphasis on Trade and Recycling. https://www.researchgate.net/publication/228282063_Trends_and_Issues_in_the_Plastics_Cycle_in_China_with_Special_Emphasis_on_Trade_and_Recycling. (Diakses pada 18 Desember 2018)

Business Wire. 2017. Market Analysis of Modified Plastics Industry in China 2017-2022, Research and Market.

- <https://www.businesswire.com/news/home/20171213006036/en/Market-Analysis-Modified-Plastics-Industry-China-2017-2022>. (Diakses pada 1 Februari 2019)
- CBI China. 2018. China Domestic Policy. https://cbi.typepad.com/china_direct/. (Diakses pada 30 November 2018)
- Cheng, Chun. China's Machinery Production Market Set to Grow 7.9% In 2018 - Plastics Industry News. <https://www.adsalecprj.com/Publicity/M/MarketNews/lang-eng/article-67030395/Article.aspx>. (Diakses pada 30 November 2018)
- China Dialogue. 2018. China Promises Restrictions On Plastic Waste. <https://www.chinadialogue.net/article/show/single/en/10412-China-promises-restrictions-on-plastic-waste>. (Diakses pada 26 September 2018)
- China Packaging Federation. 2018. Introduction of China Packaging Federation. <http://www.cpta.org.cn/static/english/index.htm>. (Diakses pada 24 Januari 2019)
- China Plastic and Rubber Journal. 2017. Latest Ranking! These Are The Top Chinese Plastics Machinery Corporations. <https://www.adsalecprj.com/Publicity/M/MarketNews/lang-eng/article-67027683/Article.aspx>. (Diakses pada 18 Desember 2018)
- Christou, Luke. 2018. Yangtze River Deposits 55% Of River Plastic – But China Is Tackling Trash. <https://www.verdict.co.uk/yangtze-river-plastic-pollution/>. (Diakses pada 28 September 2018)
- Dennis, T. E. 2017. *Independent News*. <http://www.independent.co.uk/environment/un-ocean-plastic-waste-resolution-us-china-india-reject-pollution-sea-united-nations-environment-a8095541.html>. (Diakses pada 13 Februari 2018)
- Dustrial Machinery. 2016. China's Packaging Industry Revenue is Expected to Reach 2.5 Trillion In 2020. <http://www.dkwiw.com/en/new/new-70-826.html>. (Diakses pada 24 Januari 2019)
- Earth Day Network. 2018. Fact Sheet: Single Use Plastics. <https://www.earthday.org/2018/03/29/fact-sheet-single-use-plastics/>. (Diakses pada 5 Juli 2018)

- Eckart, Jonathan. 2016. 8 Things You Need to Know About China's Economy. <https://www.weforum.org/agenda/2016/06/8-facts-about-chinas-economy/>. (Diakses pada 24 Januari 2019)
- Economy Watch. 2010. Industrial Sector. <http://www.economywatch.com/world-industries/industrial-sector>. (Diakses pada 16 April 2019)
- Embury, Tom. 2017. US Rejects International Agreement Aimed At Tackling Plastic Waste In Our Oceans. <http://www.independent.co.uk/environment/un-ocean-plastic-waste-resolution-us-china-india-reject-pollution-sea-united-nations-environment-a8095541.html>. (Diakses pada 24 Januari 2019)
- Faulder, Dominic. 2018. Asian Plastic Is Choking The World's Oceans. <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cover-Story/Asian-plastic-is-choking-the-world-s-oceans>. (Diakses pada 19 Desember 2018)
- Franzen, Harald. 2017. Almost All Plastic In The Ocean Comes From Just 10 Rivers. <https://www.dw.com/en/almost-all-plastic-in-the-ocean-comes-from-just-10-rivers/a-41581484>. (Diakses pada 28 September 2018)
- Global Data. 2018. China's Plastic Waste Ban is Shaking up the Packaging Industry. <https://www.newequipment.com/industry-trends/chinas-plastic-waste-ban-shaking-packaging-industry>. (Diakses pada 20 Februari 2019)
- Goto, Masaru. 2013. Global Waste on Pace to Triple by 2100. <http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/10/30/global-waste-on-pace-to-triple>. (Diakses pada 20 Mei 2018)
- Grey, Alex. 2018. 90% of Plastic Polluting Our Oceans Comes From Just 10 Rivers. <https://www.weforum.org/agenda/2018/06/90-of-plastic-polluting-our-oceans-comes-from-just-10-rivers/>. (Diakses pada 12 September 2018)
- GRID Arenal. 2018. How Much Plastic Waste Is Produced Worldwide. <http://www.grida.no/resources/6909>. (Diakses pada 5 Juli 2018)
- Gupta, R. (2013). *National Interests and Threat Perceptions: Exploring the Chinese Discourse*. Institute for Defence Studies and Analyses: <https://idsa.in/monograph/NationalInterestsandThreatPerceptions>. (Diakses pada 14 Maret 2018)
- IBIS World. 2018. Plastic Parts Manufacturing Industry in China. <https://www.ibisworld.com/industry-trends/international/china-market->

- [research-reports/manufacturing/plastic-product-industry/plastic-parts-manufacturing.html](#). (Diakses pada 10 Maret 2018)
- IISD. 2017. Event: Third Meeting of the UN Environment Assembly. <http://sdg.iisd.org/events/third-meeting-of-the-un-environment-assembly/>. (Diakses pada 10 Oktober 2018)
- Institute for European Environmental Policy. 2011. Plastic Waste in the Environment-Final Report. <https://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/plastics.pdf>. (Diakses pada 10 Oktober 2018)
- Jambeck, J. R. 2015. Plastic Waste Inputs from Land Into the Ocean. <http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1260352>. (Diakses pada 21 Mei 2018)
- Jane. 2014. 8 Top China Plastic Packaging Products Manufacturer. <https://www.deprintedbox.com/blog/8-top-china-plastic-packaging-products-manufacturer/>. (Diakses pada 18 Desember 2018)
- Ken Research. 2015. China Engineering Market Outlook. <https://www.kenresearch.com/metal-mining-and-chemicals/chemicals/china-engineering-plastics-market-research-report/613-101.html>. (Diakses pada 28 Desember 2018)
- Laville, Sandra. 2017. Chinese Ban On Plastic Waste Imports Could See UK Pollution Rise. <https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/chinese-ban-on-plastic-waste-imports-could-see-uk-pollution-rise/>. (Diakses pada 28 September 2018)
- Li Jing. 2015. China Produces About a Third of Plastic Waste Polluting the World's Oceans, Says Report. <https://www.scmp.com/article/1711744/china-produces-about-third-plastic-waste-polluting-worlds-oceans-says-report>. (Diakses pada 28 September 2018)
- Library of Congress. 2006. Country Profile: China. <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/China.pdf>. (Diakses pada 14 September 2018)
- Ma Chi. 2018. How Can China Tackle the Problem of Plastic Pollution?. <https://www.telegraph.co.uk/news/world/china-watch/society/plastic-pollution/>. (Diakses pada 12 September 2018)

- Messenger, B. (2017). Waste Management World. <https://waste-management-world.com/a/un-environment-assembly-resolution-to-tackle-plastic-waste-marine-litter>. (Diakses pada 13 Februari 2018)
- Mingst, Karen. 2013. United Nations Environment Programme (UNEP). <http://www.britannica.com/topic/United-Nations-Environment-Programme>. (Diakses pada 13 Februari 2018)
- Minter, Adam. 2018. China's Costly Ban on Foreign Trash. <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-06-05/china-s-costly-ban-on-foreign-trash>. (Diakses pada 10 Desember 2018)
- Moore, Thomas. 2018. 99.99% of plastic in the world's oceans 'hidden out of sight'. <https://news.sky.com/story/9999-of-plastic-in-the-worlds-oceans-hidden-out-of-sight-11496241>. (Diakses pada 13 September 2018)
- National Bureau of Statistics of China. 2017. Industrial Profits Increased in 2017. http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201801/t20180129_1578648.html. (Diakses pada 28 Januari 2019)
- Ndiso, John. 2017. Nearly 200 Nations Promise To Stop Ocean Plastic Waste. <https://www.reuters.com/article/us-environment-un-pollution/nearly-200-nations-promise-to-stop-ocean-plastic-waste-idUSKBN1E02F7>. (Diakses pada 16 Januari 2019)
- Ocean Conservancy. 2017. About Ocean Conservancy. <https://oceanconservancy.org/jobs/about-ocean-conservancy/>. (Diakses pada 4 Oktober 2018)
- Organics Recycling Group. 2011. Commission Reports On Plastic Waste In The Environment. <http://www.organics-recycling.org.uk/page.php?article=1953>. (Diakses pada 5 Juli 2018)
- Plastics Today. 2013. Global Plastics Issue: China Moves From Export Driven To Consumption Focused. <https://www.plasticstoday.com/content/global-plastics-issue-china-moves-export-driven-consumption-focused/54015133319803>. (Diakses pada 24 Januari 2019)
- Putri, Gloria Setyvani. 2017. Laut Dunia Darurat Sampah Plastik, Indonesia Turut Menyumbang. <https://sains.kompas.com/read/2017/12/05/170700623/laut-dunia-darurat-sampah-plastik-indonesia-turut-menyumbang->. (Diakses pada 21 Mei 2018)
- Research and Markets. 2017. Market Analysis of Modified Plastics Industry in China 2017-2022.

- <https://www.businesswire.com/news/home/20171213006036/en/Market-Analysis-Modified-Plastics-Industry-China-2017-2022>. (Diakses pada 1 Februari 2019)
- RTGE Staff. 2014. China's Recycling Industry Valued At \$100 Billion. <https://www.recyclingtoday.com/article/china-recycling-industry-report/>. (Diakses pada 20 Februari 2019)
- Saif. 2018. Industrialization and Economic Development. <https://owlcation.com/social-sciences/ROLE-OF-INDUSTRIALIZATION-IN-ECONOMIC-DEVELOPMENT-OF-THE-COUNTRY>. (Diakses pada 16 April 2019)
- Sparrow, Norbert. 2017. China's Import Ban On Plastic Waste Will Benefit Producers of Polyethylene. <https://www.plasticstoday.com/recycling/china-s-import-ban-on-plastic-waste-will-benefit-producers-polyethylene/213052901257464>. (Diakses pada 10 Desember 2018)
- Statista. 2018. China: GDP Per Capita 2013-2023. <https://www.statista.com/statistics/263775/gross-domestic-product-gdp-per-capita-in-china/>. (Diakses pada 22 Januari 2019)
- , 2018. China: Plastic Products Production by Month 2018. <https://www.statista.com/statistics/226239/production-of-plastic-products-in-china-by-month/>. (Diakses pada 10 Desember 2018)
- Stewart, Mike. 2015. Chinese Manufacturing Dominates Plastic Components. <https://www.itimanufacturing.com/news/chinese-manufacturing-dominates-plastic-components/>. (Diakses pada 19 Desember 2018)
- , 2017. Chinese Manufacturing Trade Benefits. <https://www.itimanufacturing.com/chinese-manufacturing/chinese-manufacturing-trade-benefits/>. (Diakses pada 19 Desember 2018)
- Swaine, M. D. 2011. China's Assertive Behavior. <https://carnegieendowment.org/2010/11/15/china-s-assertive-behavior-part-one-on-core-interests-pub-41937>. (Diakses pada 27 Maret 2018)
- The Bussiness Research Company. 2017. Plastics and Polymers Global Market Briefing. <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/plastics-and-polymers-global-market-briefing>. (Diakses pada 19 Desember 2018)
- The World Bank. 2019. GDP per capita (current US\$). <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?end=2017&start=1960&view=chart>. (Diakses pada 22 Januari 2019)

- Trading Economics. 2018. China – Economic Indicators. <https://www.indexmundi.com/facts/china/gni-per-capita>. (Diakses pada 18 Desember 2018)
- UN Environment. 2013. UN Declares War on Ocean Plastic. <http://www.unep.org/newscentre/un-declares-war-ocean-plastic>. (Diakses pada 13 Februari 2018)
- , 2017. *The CleanSeas Campaign on Marine Litter*. <http://web.unep.org/about/majorgroups/news/clean-seas-global-campaign-marine-litter>. (Diakses pada 24 Mei 2018)
- , 2018. Why Does UN Environment Matter?. <https://www.unenvironment.org/about-un-environment/why-does-un-environment-matter>. (Diakses pada 31 Maret 2019)
- , 2018. Engaging with UN Environment Assembly And Member States. <http://www.unenvironment.org/civil-society-engagement/participation-and-engagement/engaging-un-environment-assembly-and-member>. (Diakses pada 10 Oktober 2018)
- UN News Centre. 2017. ‘Turn the tide on plastic’ urges UN, as microplastics in the seas now outnumber stars in our galaxy. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56229> . (Diakses pada 14 Maret 2018)
- UN Environment Assembly. 2018. Beat Pollution. <http://www.environmentassembly/beat-pollution>. (Diakses pada 20 Mei 2018)
- , 2018. About the UN Environment Assembly. <http://web.unep.org/environmentassembly/about-un-environment-assembly>. (Diakses pada 17 Oktober 2018)
- , 2018. Document: First Session of the UN Environmental Assembly. <http://web.unep.org/environmentassembly/node/41214>. (Diakses pada 28 Agustus 2018)
- , 2018. Document: Second Session of the UN Environmental Assembly. <http://web.unep.org/environmentassembly/node/41211>. (Diakses pada 28 Agustus 2018)
- , 2018. Official Documents. <http://web.unep.org/environmentassembly/documents/official-documents>. (Diakses pada 8 Oktober 2018)

- Wellpine Plastic. 2018. Waste Plastics Recycling - WELLPINE PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD. http://www.wellpineplastic.com/comcontent_detail/FrontComContent_list01-1346316824904ContId=5&comContentId=5&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-1346316824904.html#2. (Diakses pada 20 Februari 2019)
- Wen, Yi. 2018. China's Rise from Agrarian Society to Industrial Power. <https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/april-2016/chinas-rapid-rise-from-backward-agrarian-society-to-industrial-powerhouse-in-just-35-years>. (Diakses pada 23 November 2018)
- Weston, Phoebe. 2018. China's Block On Plastic Waste Could Cause a Global Pile-Up. <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5867343/China-block-plastic-waste-cause-worldwide-pile-study-says.html>. (Diakses pada 12 September 2018)
- World Assosiation of Girl Guides and Girl Scouts. 2018. About COP 21. <https://www.waggs.org/en/what-we-do/speak-out/cop21-united-nations-conference-climate-change/about-cop21/>. (Diakses pada 10 Juli 2018)
- Wood, Johnny. 2018. Asia's Plastic Problem is Choking The World's Oceans, Here's How To Fix It. <https://www.weforum.org/agenda/2018/09/asia-s-plastic-problem-is-choking-the-world-s-oceans-here-s-how-to-fix-it/>. (Diakses pada 22 Januari 2019)
- World Intergrated Trade Solution. 2019. China | GDP per capita (current US\$) | 2013 - 2017 | WITS | Data. <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CHN/StartYear/2013/EndYear/2017/Indicator/NY-GDP-PCAP-CD>. (Diakses 22 Januari 2019)
- Worldometers. 2018. China Population (2018). <http://www.worldometers.info/world-population/china-population/>. (Diakses pada 15 September 2018)
- Worldwatch Institute. 2018. China Reports 66-Percent Drop in Plastic Bag Use. <http://www.worldwatch.org/node/6167>. (Diakses pada 15 September 2018)
- Zhang, Ivy. 2017. A report card – how Chinese plastics industry fared in 2016?. <https://www.adsalecprj.com/Publicity/ePub/lang-eng/article-67026206/asid-25/EbookArticle.aspx>. (Diakses pada 23 Januari 2019)

Artikel dari Surat Kabar

Purnaweni, H. 2017. Bom Waktu Sampah. Semarang: Suara Merdeka. 21 Februari.